



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 November 2021
Waktu	: 10.13- 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan Kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.2. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt (F-PAN)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 44 anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F/PAN)2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily. M.Si. (F-PG)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

4. Selly Andriany Gantina, A.Md.
5. Drs. H. Samsu Niang, M.Pd.
6. H. Arwan M. Aras T. S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

7. H. John Kenedy Azis, S.H.
8. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M.
9. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
10. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

11. M. Husni, S.E., M.M.
12. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M

**FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT**

13. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA**

14. MF. Nurhuda Y.
15. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.A

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

16. Drs. H. Achmad, M.Si
17. H. Hasani Bin Zuber. S.IP.
18. Wastam, S.E., S.H.
19. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA**

20. K.H. Bukhori, Lc., M.A.
21. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
22. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

23. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

24. K.H. Muslich Zainal Abidin

Anggota Izin

- :
1. M. Husni, S.E., M.M. (F- P. Gerindra)
 2. H. Maman Imanul Haq (F- PKB)
 3. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A. (F- PKS)

Undangan

- :
- Menteri Agama Republik Indonesia beserta Jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
Kepala BPJPH beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, baik yang hadir secara fisik di ruang Komisi VIII maupun secara virtual, dan
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas hal-hal penting. Kemudian sebelum acara ini dilanjutkan sebagaimana biasa di Komisi VIII Pak Menteri dan para Anggota kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan rapat kerja pada hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Berdoa mulai bagi yang beragama Islam kita baca umul kitab al-fatihah.

(BERDOA BERSAMA)

Selesai.

Pak Menteri yang kami hormati,
Para Anggota dan Pimpinan Komisi VIII yang kami hormati,

Sesuai dengan jadwal Acara Rapat-rapat di DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 13 September 2021 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 1 November 2021, maka pada hari ini Selasa 30 November 2021 Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda membahas perkembangan kebijakan haji dan umroh, serta isu-isu aktual lainnya.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja hari ini sudah dihadiri sebanyak 16 Anggota secara fisik dan secara virtual 23 Anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI, sesuai dengan Tata Tertib rapat di masa pandemi di lingkungan DPR RI dengan mitra kerja dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi dan sesuai dengan Pasal 254 ayat (5) Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020, bahwa dalam rapat dilakukan

secara virtual kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 Anggota untuk setiap Fraksi kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR.

Maka atas persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh Anggota serta Pimpinan Komisi VIII DPR R, izinkan kami untuk membuka Rapat Kerja pada hari ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim*, terbuka atau tertutup ini? terbuka ya? iya dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 10.13 WIB)

Baik,

Pak Menteri yang saya hormati,
Para Anggota dan Pimpinan,

Agenda acara hari ini dalam rapat kerja kali ini:

1. Pengantar dari Pimpinan rapat,
2. Paparan dari Menteri Agama Republik Indonesia mengenai perkembangan kebijakan haji dan umroh serta isu-isu aktual,
3. Respons dan tanya jawab dari para Anggota termasuk dari meja Pimpinan,
4. Kesimpulan dari rapat kerja hari ini,
5. Penutup,

Apakah agenda yang saya bisa saya bacakan bisa disetujui? Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kita mulai rapat pukul ini jamnya lebih cepat ini 10.15 ya, kita akhiri jam 12 dulu ya, kalau ada hal-hal yang perlu kita perpanjang nanti situasional saja. Oke 10.15 sampai jam 12.00.

(RAPAT : SETUJU)

Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran.
Para Anggota dan para Pimpinan.

Rapat Kerja pada hari ini diadakan sebagai wujud atas pelaksanaan fungsi Komisi VIII DPR RI di bidang pengawasan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam ketentuan Pasal 72 huruf d, bahwa DPR RI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Arab Saudi telah membuka kesempatan atau mencabut larangan terbang kepada lima negara di antaranya Indonesia, Pakistan, Brazil, India, dan Vietnam, serta Mesir Insya Allah mulai besok tanggal 1 Desember. Oleh karena itu dalam rangka melakukan diplomasi dan persiapan penyelenggaraan haji dan umroh di tahun mendatang Menteri Agama RI beserta tim termasuk saya bersama-sama Pak Menteri beberapa hari yang lalu baru saja pulang dari Saudi Arabia untuk melakukan beberapa pembicaraan penting kepada para pejabat Saudi Arabia di antaranya Menteri Urusan Agama Islam, Menteri Urusan Haji dan Umroh, kemudian Gubernur Mekah dan para pihak yang lainnya.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Komisi VIII melaksanakan rapat kerja untuk mendapatkan penjelasan secara rinci dan detail mengenai perkembangan terkini kebijakan umroh dan haji yang telah dinanti-nantikan oleh para calon jamaah haji dan umroh di Indonesia. Dari beberapa isu krusial yang selama ini menjadi perbincangan di tanah air adalah salah satunya adalah masalah vaksin. Tapi dari pembicaraan *alhamdulillah* vaksin sudah tidak ada masalah, tapi perlu juga diselesaikan oleh Pak Menteri nanti vaksin yang disetujui oleh Arab Saudi termasuk masalah karantina dan yang lain sebagainya penting juga disampaikan, sehingga menjadi konsumsi publik pada hari ini sehingga calon jamaah umroh dan haji benar-benar mendapatkan penjelasan yang detail dan terperinci.

Kemudian permasalahan lainnya adalah sebagaimana kita ketahui selama ini, bahwa semenjak ada pandemi Saudi Arabia menerapkan aplikasi yang sangat ketat. Semua perilaku dan kegiatan di tanah suci tidak ada yang tidak melakukan aplikasi. Di Saudi ada namanya *tawakkalna*, kemana-mana saya dengan Pak Menteri selalu ditanya *tawakkalnya* mana, saya bilang kita tidak punya *tawakkalna* kita punya *tawakaltualallah*. Dia bilang Pak nggak bisa Pak *tawakkaltu* Allah, mana *tawakkalnya*.

Jadi ini penting Bapak/Ibu para Anggota bahwa kita mau ke toko, masuk hotel, beli obat, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi semua pakai aplikasi, itu yang diakui *tawakkalna* bukan peduli lindung, sehingga kita berharap peduli lindungi ini benar-benar peduli dan melindungi. Jangan kata teman saya sudah nggak peduli juga nggak melindungi. Ya jadi ini penting kita jelaskan juga kepada publik Indonesia bahwa Saudi Arabia di tengah pandemi ini semua aktifitas jamaah mulai masuk dan keluar tanah suci atau Saudi Arabia menggunakan aplikasi *tawakkalna*, ini juga penting untuk memastikan bahwa database jamaah umroh dan haji ke depan itu benar-benar terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Saudi.

Ini juga mungkin perlu dijelaskan oleh Pak Menteri Agama nanti termasuk nanti kita akan berbicara dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak/Ibu adalah dari sisi calon jamaah umroh itu sendiri. Walaupun sudah dibuka kita berharap jamaah umroh yang akan diseleksi atau dijadwalkan oleh Kementerian Agama mohon kiranya untuk benar-benar dipastikan bahwa jamaah umroh yang akan berangkat adalah benar-benar orang yang siap, karena bukan hanya sekedar

mereka calon jamaah umroh tapi mereka sebagai duta bangsa, sebagai duta bangsa sekali lagi karena di pundak mereka ada kehormatan bangsa Indonesia. Ada kepercayaan yang harus dipegang oleh mereka yang berangkat ke tanah suci, karena sekali kita lalai sekali kita bermasalah maka kemungkinan untuk di-*banned* atau ditutup kembali itu kemungkinan besar akan terjadi kembali seperti di akhir November tahun 2020 ketika banyak calon jamaah umroh kita terpapar Covid-19. Oleh karena itu kami berharap pengetatan atau disiplin para calon jamaah umroh menjadi tolak ukur kita untuk memberangkatkan mereka ke tanah suci karena sekali lagi bukan hanya sekedar calon jamaah umroh biasa tapi mereka adalah duta-duta bangsa kita yang akan memikul kepercayaan di tanah Saudi.

Berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan umroh tersebut perlu segera dituangkan dalam bentuk revisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh pada masa pandemi Covid-19, sehingga menjadi pedoman terhadap seluruh kebijakan penyelenggaraan umroh. Selain itu penetapan biaya referensi ibadah umroh di masa pandemi juga merupakan hal yang *urgent* untuk segera direvisi, menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang akan diambil termasuk KMA Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur mengenai biaya ibadah umroh, referensi dimasa pandemi yang mencantumkan besar, besaran biaya referensi, referensi biaya umroh sebesar Rp 26juta perlu segera dikaji ulang apakah akan tetap sama ataukah akan ada terjadi perubahan biaya. Satu hal yang perlu menjadi catatan Komisi VIII DPR RI adalah agar penetapan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umroh tidak terlalu memberatkan calon jamaah.

Pentingnya perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah umroh yang berpihak pada kepentingan calon jamaah, merupakan fokus utama Komisi VIII DPR RI karena hal ini akan berdampak pada kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi atau musim haji tahun depan, jika dua permasalahan utama yaitu vaksinasi dan sinkronisasi aplikasi peduli lindung yang saya sampaikan tadi, serta kebijakan lainnya dapat dirumuskan secara bersama-sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Saudi Arabia, maka hal ini menjadi modal utama kita untuk merumuskan kebijakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang akan dibahas bersama-sama antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi VIII DPR RI.

Calon jamaah haji dan umroh sangat menunggu adanya penyelenggaraan haji dan umroh mengingat karena sudah dua kali berturut-turut dibatalkan, sehingga daftarnya terlalu panjang daftar tungguanya, kemudian juga banyak sekali calon jamaah umroh yang siap berangkat bahkan sudah bayar penerbangan dan hotel dan sebagainya.

Oleh karena itu rapat kerja hari ini sekali lagi mudah-mudahan memberikan gambaran atau *time table* rencana kerja yang detail sehingga bisa diketahui oleh publik, kapan dan bagaimana cara untuk berangkat umroh dalam waktu dekat yang memenuhi protokol kesehatan.

Pak Menteri yang saya hormati.
Para Anggota dan Pimpinan yang saya hormati.

Kita kembali dikejutkan Pak Menteri, karena ada varian baru. Varian baru Covid-19 yaitu *Omicron*. Ini sangat menyentak kita semua Afrika sedang *lockdown*, Belanda, Jerman, Austria, Hongkong, dan sebagainya juga sudah terpapar. Ini juga kami mohon dengan sangat pada Menteri Agama dan jajaran untuk mengantisipasi varian baru ini sehingga Insya Allah tidak mengganggu rencana besar kita untuk memberangkatkan para calon jamaah umroh dan haji tahun depan.

Saya kira itu Pak Menteri, mudah-mudahan rapat kerja hari ini bisa berjalan baik dan lancar dan kita bisa mendapatkan gambaran secara detail. Insya Allah sekali lagi walaupun ada varian baru *Omicron* tidak mengganggu kabar baik kita dari Saudi yang beberapa hari lalu Pak Menteri bersama kami kunjungan ke Saudi, itu bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya adalah para calon jamaah umroh bisa berangkat ke tanah suci. Demikian Pak Menteri paparan dari kami dan selanjutnya dengan hormat Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda hari ini, kepada Pak Menteri kami persilakan.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Alhamdulillahil alamin assholatu wassalamu 'ala asyofil ambiya'i wal mursalin, sayyidina wamaulana muhammadin wa'ala alihi wasohbihi ajma'in amma ba'ad.

Yang kami hormati yang terhormat Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa mengagendakan rapat kerja untuk membahas perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta isu-isu yang terkait.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.
Para Anggota Dewan yang terhormat.

Dalam kesempatan yang baik ini tentu yang pertama mohon izin kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, yang selama ini sudah memberikan banyak dukungan kepada kami dalam menjalankan tugas Pemerintahan di bidang agama.

Selanjutnya sesuai dengan agenda Raker hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta isu aktual yang terkait. Pertama perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji tahun 1443 H, kami telah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi Minggu yang lalu dalam rangka memenuhi undangan Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi dengan di dampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI. Dan di sela-sela kunjungan tersebut kami melakukan pertemuan dengan Gubernur Mekah. Gubernur Mekah ini penasihat Raja Salman sekaligus Ketua Komisi Pusat Haji Saudi, serta Menteri Haji dan Umroh, tentu dalam rangka membahas persiapan pembukaan umroh bagi warga Indonesia.

Alhamdulillah Bapak/Ibu sekalian pertemuan tersebut membuahkan hasil yang positif. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana kita tahu telah mengumumkan pada hari Kamis, 25 November 2021 bahwa terhitung mulai 1 Desember 2021 atau besok pagi memberikan izin penerbangan langsung kepada 6 negara yaitu Indonesia, Pakistan, Vietnam, Brazil, Mesir, dan India.

Hal ini menunjukkan bahwa *suspend* Arab Saudi terhadap Indonesia telah dicabut warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Saudi Arabia tanpa melalui negara ketiga. Dengan pembukaan *suspend* tersebut, maka secara otomatis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga dibuka. Namun dengan ketentuan sebagaimana sudah ditetapkan, yang pertama yaitu bagi jamaah umroh yang datang dari luar dengan menggunakan visa umroh dan telah disuntik dengan vaksin yang diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dengan dosis lengkap dibolehkan untuk langsung melaksanakan umroh dan tidak diberlakukan penerapan karantina. Kemudian bagi jamaah umroh yang telah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diakui oleh WHO diberlakukan karantina selama 3 hari dan dalam masa karantina itu selama 48 jam, setelah 48 jam akan dilakukan tes PCR dan setelah dinyatakan negatif langsung dibolehkan melaksanakan umroh.

Dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jamaah umroh, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan koordinasi dan penyiapan skema keberangkatan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain, serta asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Beberapa proses persiapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, untuk memfinalkan teknis operasional penyelenggaraan ibadah umroh menyangkut kesiapan Indonesia memberangkatkan jamaah umroh,

skenario keberangkatan jamaah prosedur *apply* visa umroh, dan pemaketan layanan bagi jamaah umroh, yang tadi sudah disinggung oleh saudara Ketua Komisi VIII,

2. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 dalam rangka persiapan penyelenggaraan umroh dimasa pandemi Covid-19. Koordinasi juga dimaksudkan dalam rangka pemantauan perkembangan vaksinasi bagi jamaah umroh serta upaya pengintegrasian sistem komputerisasi terpadu umroh dan haji khusus (Siskopatuh) Kemenag, dengan aplikasi peduli lindungi Kemenkes terkait akses dan data QR QUT sertifikat vaksin Covid-19. Proses integrasi data ini sudah dalam tahap finalisasi dan siap digunakan apabila jamaah umroh Indonesia diberangkatkan nanti.
3. Koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Otoritas Bandara Wilayah Satu Soekarno Hatta, PT Angkasa Pura II, dan Maskapai Penerbangan dalam rangka persiapan pemberangkatan jamaah umroh dimasa pandemi melalui Bandara Soekarno Hatta,
4. Pembahasan bersama asosiasi PPIU mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umroh dimasa pandemi Covid-19, antara lain mengenai kebijakan *One Gate Police (OGP)*. Skema OGP dimaksudkan sebagai suatu sistem pengendalian pemberangkatan jamaah umroh secara terpusat, dimana proses pemeriksaan kesehatan, tes PCR/swab, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan lainnya, dan skema pemberangkatan jamaah dilakukan secara satu pintu di bawah koordinasi Kementerian Agama. Hal ini tentu dimaksudkan tidak lain dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan jamaah umroh, serta upaya meyakinkan para mitra kita di Arab Saudi bahwa Indonesia telah secara serius dan baik dalam menyiapkan jamaah umroh berikut dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar sejak sebelum keberangkatan.

Dalam tahap awal skema OGP menerapkan pemberangkatan jamaah umroh hanya melalui Bandara Soekarno Hatta dan proses *screening* protokol kesehatan dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Apabila perkembangannya terbukti baik mendapatkan kepercayaan oleh Pemerintah Arab Saudi, serta terdapat peningkatan jumlah jamaah umroh maka skema OGP akan dievaluasi dan dapat dilaksanakan pada berbagai kota embarkasi keberangkatan di Indonesia,

5. Pembahasan revisi regulasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pada masa pandemi Covid-19 dan KMA Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh referensi masa pandemi. Ini sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pimpinan Rapat, bahwa biaya umroh ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jamaah,

6. Menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat pelaksanaan skema *one gate policy*. Asrama Haji Pondok Gede memiliki fasilitas akomodasi yang memadai serta fasilitas kesehatan yang cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai tempat *screening* kesehatan dan proses karantina jamaah umroh sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta.

Kemudian yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 hijriah atau 2022 masehi. Sampai saat ini kami belum menerima undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk membahas dan penandatanganan MoU penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 hijriah atau 2022 masehi. MoU ini sangat penting dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji, dimana pada MoU tersebut disepakati berbagai hal terutama besaran kuota, ketentuan-ketentuan mengenai teknis operasional haji termasuk di antaranya ketentuan mengenai pelaksanaan manasik apabila pandemi Covid-19 masih berlangsung, serta kebijakan protokol kesehatan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Beberapa persiapan yang sudah, sedang, dan akan kami laksanakan dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah/ 2022 Masehi adalah sebagai berikut;

Yang pertama, persiapan layanan haji di Arab Saudi. Kami sedang mempersiapkan rancangan kebijakan dan standar layanan untuk jamaah haji di Arab Saudi tahun 1443 hijriah yang meliputi layanan akomodasi, catering, dan transportasi darat dengan berbagai skenario besaran kuota, dan perkiraan kebijakan protokol kesehatan di Kerajaan Saudi Arabia seperti kapasitas maksimum jamaah di tiap kamar dan di bis.

Selanjutnya setelah Arab Saudi memberikan izin untuk memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, kami akan melakukan proses pengecekan layanan di Arab Saudi dalam rangka pemetaan awal ketersediaan kuantitas dan kualitas layanan, serta estimasi besaran biaya layanan dengan para penyedia layanan akomodasi, *catering*, dan transportasi di Arab Saudi.

Terkait dengan persiapan di dalam negeri, kami sudah melakukan penyusunan rancangan BPIH tahun 1443 hijriah 2022 masehi. Kami mempersiapkan dengan berbagai skenario besaran kuota, serta prakiraan kebijakan protokol kesehatan, baik dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji tahun 1443 hijriah. Kemudian pemetaan data jamaah haji.

Proses pemetaan jamaah haji dilakukan untuk identifikasi data jamaah haji yang sudah melunasi BIPIH tahun 1441 hijriah atau 2020 Masehi yang lalu, dalam rangka *updating* data jamaah tahun 1443 hijriah atau 2022 Masehi, berdasarkan pada hal—hal sebagai berikut:

Yang pertama jamaah yang melunasi BIPIH tahun 1441 hijriah atau 2020 Masehi, jumlah jamaah haji reguler yang melunasi BIPIH tahun 1441 hijriah sebanyak 198.371 orang.

Kemudian jumlah jamaah haji reguler yang telah melunasi BIPIH tahun 1441 hijriah dan telah mengajukan pengembalian setoran lunas sampai dengan tanggal 4 November 2021 sebanyak 2.363 orang atau 1,19% dan jumlah jamaah haji reguler yang telah melunasi BIPIH tahun 1441 hijriah dan mengajukan pembatalan porsi sebanyak 13535 orang jamaah atau 0,77%.

Lalu pemetaan berdasarkan kategori usia, jamaah haji yang tertunda keberangkatannya dengan usia di atas 65 tahun sebanyak 38.078 orang dan berdasarkan vaksinasi Covid-19 jumlah jamaah yang sudah divaksin sebanyak 161.021 orang dengan 100 5.544 orang di antaranya sudah mendapatkan vaksin lengkap.

Terkait dengan penyiapan transportasi udara. Saat ini Kementerian Agama sedang menyiapkan rencana perjalanan haji tahun 1443 hijriah atau 2022 Masehi yang memuat tentang skema pergerakan jamaah haji mulai dari pemberangkatan ke Arab Saudi sampai pemulangan ke tanah air. Selain itu kami juga sedang menyiapkan pedoman dalam rangka seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji.

Dan yang terkait dengan kesiapan asrama haji seluruh asrama haji dalam kondisi baik dan siap melayani jamaah haji tahun 1443 hijriah dan siap menerapkan protokol kesehatan dan bimbingan manasik haji dan umroh. Dimasa pandemi kami juga telah menerbitkan buku panduan teknis manasik haji dan umroh pada masa pandemi, panduan ini berisi tuntunan manasik yang dipergunakan jamaah haji saat kondisi pandemi Covid-19, termasuk pula beberapa alternatif fikih terhadap beberapa praktik ibadah yang dilakukan penyesuaian sebagai akibat pembatasan ibadah yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi tanpa mempengaruhi keabsahan ibadah haji dan umroh. Kami akan menyiapkan skema manasik pandemi yang terintegrasi dengan manasik di Arab Saudi secara digital.

Kemudian terkait dengan isu-isu yang terkait, yang pertama jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya. Berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh Dan Haji Khusus (Siskopatuh) sampai saat ini terdapat 59.757 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19. Dari jumlah ini terdapat 18.752 orang yang sudah memegang visa dan siap untuk diberangkatkan. Jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umroh pada bulan Desember nanti.

Kemudian skenario penyelenggaraan ibadah umroh. Kementerian Agama sudah menyiapkan skenario penyelenggaraan ibadah umroh dimasa pandemi Covid-19, skenario yang disusun bersama dengan K/L terkait serta

asosiasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh meliputi skenario sebelum keberangkatan ketika berada di Arab Saudi dan saat tiba di tanah air. Rincian dari skenario tersebut, yang pertama sebelum keberangkatan jamaah haji melaksanakan *screening* kesehatan 1x24 jam sebelum keberangkatan secara terpusat di Asrama Haji Pondok Gede.

Hanya jamaah yang sudah yang berusia 18 sampai 65 tahun sudah divaksinasi dosis lengkap dan memiliki hasil tes PCR negatif yang diberangkatkan umroh. Kemudian jamaah yang akan berangkat wajib dilaporkan kepada Kemenag untuk diproses visa dan dokumen keberangkatannya dan yang ke-empat keberangkatan jamaah umroh menggunakan satu pesawat full diisi dengan jamaah umroh tanpa ada penumpang lain.

Kemudian skenario saat di Arab Saudi, jamaah wajib karantina selama tiga hari dimulai dari saat tiba di Arab Saudi, selama masa karantina dilarang keluar dari kamar hotel. Kemudian pelaksanaan ibadah umroh selama 9 hari termasuk perjalanan pulang pergi, lalu akomodasi diisi dua orang per kamar, makan disajikan dalam kemasan, dan transportasi mengikuti ketentuan Arab Saudi.

Berikutnya umroh dilaksanakan satu kali, umroh dilaksanakan satu kali, sholat lima waktu di Masjidil Haram melalui e-Tamarna ini aplikasi, dan bebas sholat lima waktu di Masjid Nabawi. Juga wajib melakukan tes PCR sebelum kepulangan, hanya yang hasilnya negatif diperbolehkan kembali ke tanah air.

Kemudian skenario saat tiba di Indonesia, jamaah wajib melakukan tes PCR sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta dan jamaah wajib melakukan karantina setelah perjalanan luar negeri mengikuti ketentuan satgas Covid-19 di hotel yang telah dipilih PPIU dan mendapatkan legalisasi dari satgas Covid-19.

Bapak/Ibu sekalian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Kemudian isu yang terkait dengan revitalisasi UPQ yang berstandar internasional. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam merancang revitalisasi UPQ (Unit Percetakan Quran) menuju percetakan Alquran bertaraf dunia menargetkan olah cetak sebanyak 10 juta eksemplar per tahun. Di samping itu UPQ juga di dorong menjadi destinasi wisata religi, pusat penerbitan dan percetakan buku-buku keislaman yang moderat, dan pusat edukasi ilmu-ilmu Alquran.

Program revitalisasi UPQ ini juga ditindak lanjuti melalui kunjungan delegasi Menteri Agama ke percetakan Alquran King Fadh pada hari Selasa 23 November 2021 yang lalu. Kunjungan tersebut kami mewacanakan percetakan di Madinah sebagai *benchmark* revitalisasi UPQ dimana setiap tahun mampu mencetak sejumlah 18 juta eksemplar mushaf Alquran. Pengelolaannya juga di dukung dengan teknologi mesin yang canggih dari pengolahan master naskah, proses *printing*, pengecekan kualitas, tashih atas

kesalahan, dan sistem pengemasan yang serba otomatis dengan estimasi usia mesin dapat bertahan selama 100 tahun. Pada kesempatan ini juga kami lakukan peninjauan kerja sama di antara keduanya antara lain peninjauan kerja sama pengelolaan percetakan dan pelatihan manajemen percetakan Alquran, penyediaan Alquran *seca*, serta pembangunan Islamic Center Indonesia yang sudah dibicarakan langsung dengan Menteri Urusan Islam, dakwah, dan penyuluhan Arab Saudi.

Disatu sisi secara prinsip semua pihak, baik Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan memberikan respons positif upaya kita dalam revitalisasi UPQ dan berupaya untuk memberikan justifikasi yang lebih tajam tentang pentingnya revitalisasi ini. Namun disisi yang lain usulan anggaran yang cukup besar tentu akan berdampak pada porsi anggaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada khususnya dan Kementerian Agama secara keseluruhan. Dalam pembahasan antara Kementerian Agama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR disampaikan usulan skenario penganggaran revitalisasi ini berupa hibah luar negeri dan SBSN. Kami berharap dalam forum yang terhormat ini dukungan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat agar pelaksanaan revitalisasi UPQ ini dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam memberikan *support* tentang penyediaan anggaran melalui anggaran tambahan *onto budget* dengan mekanisme hibah dan SBSN sebagaimana yang telah disampaikan di atas.

Bapak/Ibu sekalian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pada hari ini, yang terkait dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta isu-isu aktual yang terkait. Adapun hal-hal detail terkait kebijakan haji dan umroh akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII bersama Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat,

Atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada Pemerintah, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita semua, Aamiin ya robal alamin. Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.

(Suara Tidak Jelas)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Menteri Agama atas paparannya. Sekarang kami persilakan kepada para Anggota untuk memberikan respons terhadap paparan dari Pak Menteri Agama tadi.

Kami mulai dari Fraksi PDI-P Ibu Selly silakan, nanti siap-siap dari Golkar.

F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII.
Bapak Menteri beserta jajaran.

Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, selamat ulang tahun kepada Ibu Pimpinan Ibu Diah Pitaloka semoga berkah dan diberkahi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

KETUA RAPAT:

Tadi mau kita siram pakai air dulu tapi sudah dibongkar.

F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):

Iya karena ini rapat yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan ada Bapak Menteri mudah-mudahan di doakan oleh semua.

KETUA RAPAT:

Amin.

F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* .

Terima kasih Bapak Menteri sudah menjelaskan kepada kita semua, semoga apa yang sudah dipaparkan Bapak Menteri menjadi angin surga dan menjadi berkah buat masyarakat Indonesia, sehingga apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan oleh para jamaah betul-betul dikabulkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Kami berharap apa yang dipaparkan oleh Bapak Menteri betul-betul bisa terwujud di tahun 1443 hijriah nanti dan kita harap di 1 Desember nanti betul-betul menjadi awal dari pemberangkatan para jamaah umroh Indonesia untuk bisa diberangkatkan pada saat musim pandemi Covid-19 nanti.

Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kaitan dengan *one gate police* kami apresiasi dan Dirjen PHU sebagai regulator dan eksekutor, mudah-mudahan betul-betul bisa mengeksekusi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kami berharap bahwa aplikasi peduli lindungi itu bisa terintegrasi dengan apa yang sudah menjadi *data base* yang ada di Kementerian Agama, maupun yang ada di visa yang ada di para yang ada menjadi visa yang ada di jamaah.

Karena bagaimana pun juga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena pada saat nanti pelaksanaan umroh maupun pelaksanaan haji, peduli lindungi ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, apalagi Pemerintah Saudi Arabia juga mempunyai aplikasi yang selama ini kan menjadi bagian yang masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Saudi Arabia dengan Pemerintah Indonesia. Nah ini yang masih saya masih ingin mendapatkan penjelasan dari Pak dari Gus Menteri kepada kami, yang kemarin pada saat berangkat ke Saudi Arabia ini kaitan dengan aplikasi yang kemarin sempat ramai ini, bagaimana ini hasil akhir dari pertemuan di Saudi Arabia mengenai aplikasi peduli lindungi dengan aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Saudi Arabia.

Kemudian tadi sempat disampaikan bahwa masih ada 59ribu jamaah umroh yang memang pada tahun 2021 sudah melunasi kemudian Insya Allah pada tahun sekarang pada saat dibuka, mereka akan diberikan kesempatan dan pada tahun ini sebetulnya sudah ada 18ribu yang visanya sudah ditetapkan dan mereka siap berangkat. Nah kira-kira dari 18ribu para jamaah yang visanya sudah siap ini dengan kategori 18 tahun sampai 65 tahun ini yang betul-betul akan menjadi perwakilan Indonesia, yang betul-betul menjadi duta Indonesia ini ada berapa banyak? Karena tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mereka akan berangkat menjadi perwakilan Indonesia betul-betul menjadi perwakilan yang jangan sampai membuat nama baik Indonesia tercorengi, karena kita tidak ingin kita mendapatkan *suspend*, karena ini pernah terjadi pada saat beberapa saat tahun yang lalu.

Kemudian saya juga mensoroti bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa pada saat nanti ini dibuka *one gate police* tentu saja akan terkait dengan biaya yang akan dibebankan kepada para jamaah. Nah pada saat kita belum berangkat belum terjadi pemberangkatan 26 juta tentu saja ini adalah beban biaya yang sangat berat untuk para jamaah. Nah apalagi kalau

misalnya kita, kita akan menetapkan 26 juta ini dengan klasifikasi yang tadi disempatkan yang disampaikan Gus Menteri, apakah ini betul-betul sudah disepakati oleh para KBIH apa belum ini, karena atau mungkin *travel-travel agent*? karena seperti yang kita tahu bahwa banyak juga ini *travel-travel agent* yang ternyata pelayanannya sangat berbeda-beda. Nah mungkin ini juga harus ada keterbukaan antara satu travel agent dengan satu *travel agent* yang lainnya, karena banyak juga ini para jamaah yang mungkin mereka ada di pelosok daerah yang ternyata mereka mungkin masih ditawarkan dengan iming-iming biaya yang sangat murah.

Nah, mungkin yang harus saya harapkan kepada Pemerintah, terutama dari Kementerian Agama kaitan para jamaah yang setelah mereka selesai melakukan umroh, pada saat mereka pulang ke tanah air kita masih ditakuti dengan gelombang ketiga Covid, apalagi dengan ya mohon maaf yang namanya virus *Omicron* ini kan 500 kali lipat ganasnya, 500 Pak ya ya itu yang membuat saya agak ketakutan untuk pergi keluar ini.

Nah maksud saya ini bagaimana ini kita antisipasi, karena pada saat kita berangkat umroh kesana, para jamaah kan pasti akan berinteraksi dengan para jamaah dari luar dengan dari negara-negara lain. Nah antisipasi untuk karantinannya ini, apakah kita bisa memaksimalkan embarkasi haji atau mungkin asrama-asrama haji, bukan hanya hotel tetapi mungkin asrama-asrama haji kita yang sangat bagus ini kita maksimalkan milik kita gini kan. Nah maksud saya ini adalah antisipasi dengan memaksimalkan apa sarana-sarana yang kita miliki.

Nah terkait dengan isu-isu aktual Pimpinan, saya setuju bahwa kalau kita ingin maksimalkan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Menteri tentang pembangunan UPQ Alquran, percetakan Alquran saya sangat sepat, karena selama ini kita menyadari ya Pak Sekjen ya, dari awal kita ingin memperbaiki percetakan Alquran yang kita ingin miliki. Bahkan kalau bisa percetakan Alquran ini bukan hanya dipergunakan oleh kita saja. Kalau perlu dari percetakan-percetakan lain juga kalau perlu pergunakan yang kita miliki.

Nah tetapi bukan itu saja, ada isu-isu aktual lain yang menyangkut dengan Kementerian Agama yang harus menjadi sensitivitas dari Kementerian Agama, salah satunya kaitannya dengan masalah *inpassing* dan guru-guru PPPK. Kenapa itu tidak menjadi salah satu yang diajukan kepada Komisi VIII, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan Pak Sekjen, Gus Menteri. Komisi X mereka sangat serius dan konsen untuk mengajukan anggaran kaitan dengan guru-guru *inpassing* dan guru-guru PPPK. Kami pada saat reses kemarin selalu dipertanyakan oleh guru-guru yang menyangkut dengan tenaga-tenaga PPPK dan *inpassing*. Saya dibuat sedih saat mereka menyampaikan bagaimana dengan nasib kami, rasanya kalau Gus Menteri hari ini menyampaikan kepada kami, kami siap untuk untuk menyetujui anggaran apa yang disampaikan Gus Menteri kepada kita semua. Rasanya Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII akan menyetujui apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari mitra kita terutama dari

Kementerian Agama berapa pun yang diinginkan oleh Kementerian Agama kita akan setuju pada hari ini.

Mungkin itu saja Pimpinan yang menyangkut dengan isu-isu aktual yang khususnya yang disampaikan oleh Gus Menteri. Kaitan dengan BPIH atau BIPIH untuk tahun anggaran, tahun 1443 hijriah rasanya memang dalam waktu secepatnya harus kita buat panja dan panja itu tidak bisa kita tunggu terlalu lama Pimpinan. Terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bu Selly dari PDIP.

Kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar silakan Pak Jhon Kenedy Azis.

F-GOLKAR (H. JHON KENEDY AZIS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Saudara Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Alhamdulillah wasyukurillah hari ini kita rapat lengkap dengan Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Hari ini kita membicarakan mengenai masalah haji dan umroh. Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Menteri. Cuma menjadi pertanyaan saya Pak, kita bicara haji umroh tapi Dirjen Haji Umroh nggak kelihatan ini gitu loh ya? Oh di karantina oh iya. Saya pikir karena ini adalah hajatnya Dirjen PHU dan saya dengar juga Dirjennya juga baru tadinya diperkenalkan kepada kita gitu loh tapi nggak apa-apalah ya.

Saya Jhon Kenedy Azis Pak Dirjen, alangkah senangnya kami mendengarkan artinya berita baik yang disampaikan oleh Pak Menteri. *Alhamdulillahirabil alamin* besok tanggal 1 Desember 2021, kembali Pemerintah Indonesia memberangkatkan jamaah umroh ke tanah suci. Pertanyaan pertama saya adalah apakah pemberangkatan itu hanya untuk Jakarta atau untuk seluruh Indonesia? Tadi sebab disinggung juga mengenai Asrama Haji Pondok Gede dipergunakan sebagai *screening* jamaah umroh yang akan berangkat ke tanah suci. Nah bagaimana dengan jamaah-jamaah umroh yang berasal dari Ambon, Papua, Aceh apakah juga akan

mempergunakan asrama haji sebagai tempat *screening* jamaah umroh? Pertama itu.

Yang kedua, adalah tadi disampaikan sama Pak Menteri ada 6 negara yang telah dibuka *suspend*-nya oleh Pemerintah Arab Saudi dan disampaikan juga bahwa jamaah umroh yang sudah vaksin lengkap yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi langsung bisa umroh. Namun kalau seumpamanya vaksinnya hanya yang berdasarkan referensi dari WHO di karantina tiga hari, apakah karantina itu menjadi tanggung jawab jamaah umroh atau sudah termasuk dengan biaya umroh secara keseluruhan?

Berkaitan dengan vaksin ini, tadi juga saya mendapat informasi dari Pak Menteri bahwa ketika pulang wajib PCR betul. Kami melakukan kunker ke luar, ke luar negeri juga pada waktu pulang kita melakukan PCR, yang positif bisa langsung kembali ke Jakarta, yang eh yang negatif bisa langsung kembali ke Jakarta maaf, yang positif berarti menginap di Arab Saudi, siapa yang tanggung jawab, apakah travelnya sebab kadang-kadang jamaah umroh itu juga duitnya pas-pasan ya ketika melaksanakan umroh itu nah siapa yang tanggung jawab, bagaimana makannya, bagaimana hotelnya, dan bagaimana transpornya kemudian? Karena itu tidak mudah juga untuk *re-schedule* penerbangan itu, yang tadinya pulang katakanlah tanggal 10 karena dia positif, dia pulang menjadi tanggal 14 atau tanggal 13, nah siapa yang tanggung jawab dalam konteks itu?

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya mendapat informasi dari Pak Menteri, bahwa walaupun Pak Menteri sudah melakukan kunjungan ke Arab Saudi, namun Pemerintah Indonesia belum menandatangani MoU dengan Pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan haji, kan begitu Pak Menteri. Haji tanggal 9 Juli loh Pak, Pak Menteri. Biasanya kami di Komisi VIII ini bulan November-Desember ini sudah membentuk Panja Haji. Bulan November-Desember biasanya kami sudah membentuk Panja Haji dan biasanya akhir Januari atau pertengahan Februari kita panja sudah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk *pre pare* pemberangkatan calon jamaah haji.

Kalau misalnya Pemerintah Indonesia belum menandatangani MoU dengan pemberangkatan jamaah haji ini menjadi masih menjadi, walaupun saya secara pribadi dan kawan-kawan di Komisi VIII ini yakin bahwa jamaah haji tahun 2022 pasti berangkat, namun oleh rakyat Indonesia ada muncul pertanyaan-pertanyaan, ini berangkat nggak kita. Saya *haqqul* yakin saya berangkat Amiin, Komisi VIII berangkat tapi kan nggak cukup di Komisi VIII saja ya. Kami harus menyampaikan apa hasil rapat kami ini dengan, dengan masyarakat calon jamaah haji. Terus terang saja Pak ada suatu kepesimisan di, dibalik seluruh optimisnya kami ada suatu kepesimisan juga padahal Pak Menteri kan sudah berkunjung ke Pemerintah Arab Saudi.

Mohon artinya penjelasan dari Pak Menteri apa sebabnya kira-kiranya Pemerintah Arab Saudi belum menandatangani MoU tentang

pemberangkatan haji 2022 dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebagai apa namanya, sebagai untuk kami jelaskan juga kepada apa namanya. Kami di Dapil kan ada diseminasi haji, ada jamuroh jadi banyak kesempatan-kesempatan kita untuk bertemu dengan calon-calon jamaah haji Pak Menteri.

Selanjutnya Pak Menteri, hal-hal lain kami sejak kunker sejak reses kan baru hari ini kita berkumpul Pak Menteri. Permintaan pertama kami yang kami harus laporkan sekaligus kami laporkan kepada Pak Menteri, kalau bisa Pak Menteri hasil-hasil kunker kami merupakan prioritas utama pekerjaan artinya kerjasama yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Sebab pada waktu-waktu kunker itulah kami menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Kami mohon kepada Pak Menteri, baik kunker yang bersifat kunker spesifik maupun kunker Komisi, maupun kunker per orangan kami ke daerah pemilihan, sebab pada waktu itu ya sebagai pengobat masyarakat atau sebagai pengobat, konsituen kami kan banyak juga membawa proposal-proposal dan memberikan janji-janji kepada konsiten kita. Jadi sekali lagi saya minta kepada Pak Menteri supaya artinya memprioritaskan hasil kunker kami yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Pak Menteri yang saya hormati.

Ketua, saya mohon waktu agak dua menit, tiga menit lagi Pak. Ini saya tidak memunculkan lagu lama aransemen baru tidak gitu loh ya. Tapi karena memang banyak aspirasi-aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami atas *statement-statement* yang disampaikan oleh Pak Menteri, kalau kami tidak sampaikan Pak kepada Pak Menteri dalam kesempatan yang berbahagia ini nanti mata saya bintitan Pak Menteri sebab ini pesan yang harus saya sampaikan kepada Pak Menteri.

Pesan itu adalah berkaitan dengan videonya Pak Menteri beberapa hari yang lalu, yang mengatakan *statement*-nya Pak Menteri adalah bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama. Secara spesifik pada waktu Webinar Hari Santri Nasional yang diadakan oleh *rabitahma ahid islamiyah* atau RMI, disampaikan oleh Pak Menteri pada waktu itu kehadiran Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama secara spesifik, bukan umat Islam secara keseluruhan. Banyak yang tergores Pak Menteri akibat daripada pernyataan Pak Menteri ini. Saya Nahdliyin Pak Menteri, saya salah satu penasihat Nahdliyin di Sumatera Barat ya Pak Menteri. Ke-Nahdliyin saya nggak usah Pak Menteri ragukan ya, tapi disisi lain saya sebagai umat Nahdliyin benar-benar sangat menyayangkan apa yang Pak Menteri ucapkan ini sangat melukai hati-hati umat Islam pada umumnya.

Menurut saya pernyataan Pak Menteri tersebut, mohon maaf saya sampaikan, ini harus saya sampaikan sepahit apa pun dan saya berharap Pak Menteri jangan musuhi saya nanti setelah saya ucapkan ini gitu loh. Ya awas loh Pak Jhon Kenedy catat Pak Sekjen katanya kan program-program

no way buat Pak Jhon katanya, punten Pak Menteri maaf Pak Menteri. Ini Pak Menteri kan juga lama di DPR kalau ini tidak disampaikan mati saya Pak gitu loh, Pak Jhon nggak ada keberaniannya untuk menyampaikan gitu. Jadi tolong jangan dicatat Pak Sekjen, nama saya Pak Sekjen ya.

Jadi menurut hemat saya ini sangat tedensius Pak, artinya bisa memantik polemik antar kita Islam di daerah di seantero Indonesia ini. Jadi untuk artinya mengklarifikasi pernyataan-pernyataan itu melalui tempat yang terhormat ini yang notabennya 53 orang Anggota DPR di Komisi VIII yang merupakan representatif daripada masyarakat Indonesia. Saya pikir ada suatu kesempatan yang paling baik, artinya Pak Menteri mengklarifikasi atas ucapan Pak Menteri tersebut. Sebab setelah saya teliti Pak Menteri ternyata Menteri-Menteri Agama ketika dimulai dibentuknya Kementerian Agama itu banyak juga yang dari Muhammadiyah gitu loh. Bahkan Menteri Agama yang pertama memang NU, Menteri Agama yang kedua, yang ketiga kalau nggak salah dari Muhammadiyah gitu.

Jadi oleh karena itu apa namanya saya mohon, saya bicara begini karena saya sangat sayang sama Pak Menteri gitu loh ya. Saya nggak mau Pak Menteri artinya di belakang orang bermacam-macam oleh masyarakat. Makannya melalui kesempatan ini saya mohon Pak Menteri dapat mengklarifikasi.

Terima kasih Pak Menteri ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya banyak catatan saya pada waktu saya kunker itu, tapi pada intinya sudah saya sampaikanlah gitulah ya. Barangkali kalau misalnya ada kekurangan nanti teman-teman yang lain bisa menyampaikannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Jhon Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar. Kami persilakan selanjutnya dari Fraksi Gerindra, Pak Husni silakan Pak Husni.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua Komisi VIII.

Kemudian Ketua Komisi VIII juga yang lagi berulang tahun, mudah-mudahan nanti kita makan besar nanti Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Sudah sebulan yang lalu saya ulang tahun, jangan diulang-ulang terus tahunnya.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Yang saya hormati tentunya teman-teman Komisi VIII.
Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya.

Pertama, yang ingin saya sampaikan Pak Menteri tentunya ucapan suka cita dan terima kasih kami, Pak Menteri baru pulang dari Saudi dalam keadaan sehat wal'afiat dan membawa kabar gembira untuk seluruh masyarakat di Republik Indonesia tentang penyelenggaraan haji dan umroh.

Namun disini Pak Menteri ada yang mengganjal ya dihati, yang ingin saya tanyakan bahwa kemarin Pak Menteri diterima oleh seorang Gubernur Mekah, sedangkan masalah tentang haji dan umroh ini mestinya yang memutuskan adalah dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ini tolong nanti Pak Menteri perjelas, karena jangan ada timbul keragu-raguan apalagi daripada penunggu masyarakat yang telah melunaskan haji yang tahun 2020 dan 2021.

Pak Menteri juga mengatakan, bahwa kita sudah dicabut *suspend* oleh Arab Saudi tentang keberangkatan, kedatangan kita ke Mekah dan ke Arab Saudi bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 ini penerbangan sudah ada langsung. Seperti yang kita sama ketahui ya Pak Menteri, kita di *suspend* Arab Saudi di saat kita betul-betul Covid-19 itu berada di puncak, di puncak daripada Juni, Juli, Agustus untuk di republik kita itu sangat, sangat apa sangat tinggi sekal, tapi di Oktober menurut Menteri Keuangan kita adalah nomor empat terbaik dunia dalam penanganan Covid-19 itu sendiri.

Jadi di sini juga masalah vaksin, masalah vaksin kita akan dilakukan karantina apabila tidak menggunakan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, rata-rata di republik ini menggunakan Sinovac. Tapi pada bulan Oktober sudah banyak vaksin-vaksin lain yang masuk yang juga digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi ya dan juga banyak masyarakat di sini juga, saya pengen butuh penjelasan Pak Menteri tentang masalah *booster* apakah apabila kita misalnya dua kali vaksin sinovac, kemudian dilakukan *booster*, ya seperti ada teman saya disini sudah melakukan *booster* ya Pak Jhon ya cuma Pak Jhon *booster*-nya di Amerika Pak, nah beda saja sama saya. Jadi apakah yang seperti ini juga tidak perlu dikarantina.

Kemudian juga Pak Menteri, di sini dikatakan bahwa nanti akan dilakukan oleh maskapai penerbangan. Kemarin yang lalu-lalu yang kami ketahui maskapai penerbangan yang boleh melakukan perjalanan ke Arab

Saudi itu cuma Saudi Air. Apakah sekarang Garuda atau penerbangan *airlines* lainnya yang ada di republik kita itu juga bisa melakukan penerbangan ke Saudi? Jadi bukan hanya pesawat mereka saja.

Kemudian juga masalah pembiayaan, pembiayaan tadi Pak Menteri melakukan mengatakan bahwa 1x24 jam itu ada di Pondok Gede, kemudian umroh itu sendiri ada 9 hari. Saya endak tahu 9 hari ini apakah sudah ditambah dengan tiga karantina di Saudi? Kemudian juga yang ingin saya tanyakan, tiga hari setelah kita sampai di tanah air itu tiga hari ya kalau sekarang peraturan tiga hari kita harus di karantina. Apakah karantina itu menggunakan hotel atau kita menggunakan asrama haji yang ada di Pondok Gede? Karena tadi juga Pak Menteri ini juga tidak menjelaskan secara detail dan juga seperti teman-teman saya katakan, apakah pembiayaan-pembiayaan ini menjadi tanggung jawab para si calon jamaah umroh itu sendiri atau bantuan-bantuan dari Kementerian Agama?

Kemudian lagi tentang kesiapan, ya tadi juga teman saya menanyakan tentang pembahasan dan penandatanganan MoU. Ini sampai hari ini kan belum dilaksanakan. Tadi dikatakan bahwa mungkin Juli kita sudah melakukan pemberangkatan. Pasti seperti yang sudah-sudah kita Komisi VIII dengan Dirjen PHU selalu melakukan pembahasan-pembahasan tentang masalah teknis keberangkatan dari pada keberangkatan haji itu sendiri. Ya kalau bisa ini sesegera mungkin untuk dapat dikejar, karena waktunya juga ini sudah besok sudah Desember, saya pikir ini mudah-mudahan awal-awal Januari ini sudah kita sudah mendapatkan berita baik lagi. Biasanya kalau Pak Menteri ini ke Saudi pulang pasti bawa berita baik saja.

Kemudian lagi masalah satu pintu, masalah satu pintu keberangkatan tentunya melalui Bandara Soekarno Hatta. Saya melihat ini kan calon jamaah haji ini kan luar biasa, apa calon umroh ini kan luar biasa yang apa kemarin juga yang telah melunaskan. Apakah misalnya kalau kampung saya di Medan apakah mereka harus melakukan penambahan-penambahan biaya, baik itu untuk pemberangkatan dari Medan ke Jakarta, menambah biaya lagi untuk di apa di 1x24 jam di Pondok Gede, dan juga waktu pulang, pulang kembali ke tanah air di karantina kembali. Kemudian inilah kalau sudah lama nggak ketemu Pak Menteri ngomongnya pun jadi banyak ini ya. Kemudian ini Pak Menteri saya kemarin pulang ke Medan Pak Menteri yang menyeter

KETUA RAPAT:

Yang memang biasanya Pak Husni, biasanya saya ingati tapi ini saya biarin dulu ini.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Oh ya ya.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Rindu ini Pak Ketua jadi mohon dimaklumilah. Jadi begini Pak Menteri ya, saya kemarin lihat waktu saya turun ke dapil saya di Medan itu orang yang keluar, keluar maksudnya dia menarik dana hajinya dengan orang yang datang baru menyetor itu hampir sama banyaknya itu Pak Menteri. Jadi karena ini, ini sangat penting dipublikasi ke depan ya sangat penting untuk dipublikasi ke depan apalagi setelah dibukanya pintu umroh yang juga kita berharap haji itu juga mudah-mudahan kuotanya minimal sama dengan yang terakhir kita diberangkatkan haji kita lebih kurang 220ribu ya saya tidak salah.

Kemudian ini lagi ya Pak Menteri, usia 65 tahun ke atas tentunya sudah di, di apa ya tidak boleh berangkat ya ada 38.078 orang itu saya lihat ini untuk pemberangkatan tahun 2020 calon jamaah haji tahun 2020 yang akan diberangkatkan Insya Allah 2022, apakah yang 38ribu ini di-switch ini bahasa orang dagangnya kaya gitu Pak, dipindahkan gitu ya ke 2021 atau memang dicari orang-orang yang baru jadi supaya tidak ada keragu-raguan daripada calon jamaah haji ini sendiri. Kemudian lagi satu apa saya mau tanya masalah haji ini kapan setahu saya 72 jam sebelum sampai ke Arab Saudi itu dia sudah harus di PCR.

Jadi apakah PCR ini kalau misalnya apa calon haji apa calon umroh apakah PCR-nya itu sendiri dilakukan di kampung halaman atau memang harus dilakukan di asrama haji itu sendiri. Kemudian yang terakhir Pak Ketua, tentunya kami sangat mendukung tentang masalah program UPQ, kami sangat mendukung sekali karena kita Insya Allah republik ini bisa membumikan Alquran. Mudah-mudahan menjadi sebuah apa ya bahwa Alquran itu sebuah kebiasaan daripada masyarakat-masyarakat atau anak-anak kita di dalam melakukan Alquran itu sendiri.

Saya rasa itu saja Pak Menteri, mudah-mudahan tadi apa yang dikatakan oleh teman saya Pak Jhon Kenedy Azis, mudah-mudahan tidak ada apa, apa itu ya bahasa-bahasa yang aneh-aneh ya karena apa pun ucapan Pak Menteri itu menjadi seperti sebuah undang-undang buat kami masyarakat kita semua. Saya rasa itu saja Pak Ketua lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik walhidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Husni dari Fraksi Gerindra. Kami lanjutkan dipersilakan dari Fraksi Nasdem Ibu Hj. Lisda, kami persilakan.

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.
Yang saya hormati Bapak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang hadir.

Alhamdulillah senang sekali mendengar kabar yang sudah Pak Menteri sampaikan kepada kita semua dan ini juga tentu menjadi berita gembira untuk masyarakat Indonesia, khususnya bahwa Indonesia ini salah satu dari 6 negara yang keluar dari *suspend* dan sehingga Insya Allah kita segera bisa melaksanakan umroh pada bulan Desember ini ya Pak Menteri dan tentu saja harapan masyarakat kita pun dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun mendatang tidak ada pembatalan lagi, itu harapan masyarakat.

Yang ingin saya sampaikan disini, hanya sekedar untuk mengingatkan saja Pak Menteri bahwa seperti kita ketahui, bahwa sekarang ini sedang ada varian baru *Omicron* yang ternyata berlipat-lipat kali ganasnya. Sementara dari efektivitas vaksin Covid-19 ini sendiri mengalami penurunan pada setelah suntikan kedua di bulan keempat, sehingga menurut hemat kami kita perlu berkoordinasi kembali dengan Kementerian Kesehatan ya untuk pada bulan kapan harusnya atau sebulan sebelumnya kah, dua bulan sebelumnya kah sebelum pemberangkatan umroh untuk jamaah tersebut dapat menerima vaksin terakhir atau *booster*, sehingga pada saat kita berada di tanah suci itu kita pada posisi yang sangat-sangat prima. Ya sama seperti misalnya pada saat kita suntik meningitis ya meningitis itu kan efektifnya tiga minggu setelah suntik, sehingga kita disarankan ya sebulan sebelumnya sudah suntik meningitis. Saya berharap itu pun akan menjadi perhatian kita.

Kemudian untuk masalah aplikasi tawakkalna ya saya baru saja juga men-*download* dan saya berharap bahwa dari Kementerian ini segera mensosialisasikan, karena kita melihat masyarakat kita ya mungkin dari sisi usia dan segala macam sehingga segeralah perlu disosialisasikan untuk aplikasi ini.

Dan selanjutnya untuk pesawat *full* yang diisi oleh jamaah umroh, ini kami sangat menyambut baik Pak Menteri dan kami pun berharap bahwa kalau memang sudah dibuka dari embarkasi lain selain daripada Jakarta, kami berharap pesawat ini bisa *direct* ke Jeddah atau Madinah langsung full diisi oleh jamaah. Itu harapan kami sehingga tidak terlalu banyak mereka transit di Jakarta, bertemu lagi dengan orang dan segala macam dan ini akan lebih me-*minimize* daripada kemungkinan-kemungkinan tertular Covid-19.

Yang lain-lainnya dari diseminasi haji yang kami laksanakan dalam waktu yang lalu, seperti ya harapan dari jamaah keseluruhannya tentu saja mengharapkan haji ini dapat dilaksanakan pada tahun depan dengan biaya yang tentunya mereka berharap tidak ada biaya tambahan lagi yang dikeluarkan.

Demikian saja. Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bu Hj. Lisda dari Fraksi Nasdem. Kami persilakan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada Ibu Anisah Syakur, silakan Bu.

F-PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

F-PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR):

Terima kasih atas waktunya.

Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh rekan-rekan Komisi VIII.
Bapak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang saya hormati pula.

Saya pertama memberikan rasa syukur dan gembira rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena apa yang telah kita nanti-nantikan selama ini, kita tahu bahwa Gus Menteri sudah melakukan berkali-kali nego dengan Saudi Arabia akhirnya membuahkan suatu hasil yang bisa dirasakan kegembiraannya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan akan dibukanya umroh kembali per 1 Desember. Kalau saya baca di koran seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenyataan, sehingga mereka-mereka yang semula berharap-harap cemas ini sekarang sudah bisa mendapatkan satu kepastian bahwa mereka bisa berangkat umroh.

Tetapi saya pribadi tentu masih agak sedikit kecewa, karena apa benar masih ada batasan umur itu, karena kan informasinya itu kan umurnya 18 sampai 65, sedangkan kan saya sudah kepala 7 ini bisa berangkat apa tidak ini kira-kira. Itu yang ingin kami minta kejelasan, apakah masih tetap ada batasan umur atau kah mungkin tidak ada batasan umur, kalau endak ada

alhamdulillah kami sangat bersyukur sehingga siapa pun bisa berangkat masalah umroh.

Dan mungkin umroh ini juga merupakan bagian dari pada *castis* untuk bisa diberangkatkannya haji tahun 22 dan kira-kira apakah memang ya kalau menurut sinyalnya Insya Allah lah 22 itu haji akan berangkat dan tentu kami berharap bagaimana para jamaah haji ini benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Hanya kami pengen mengetahui kira-kira berangkat itu kuota yang diberikan kepada Indonesia itu berapa? Karena kan kita sudah dua tahun tidak berangkat, sehingga menumpuknya jamaah ini bagaimana mengatasi ke depan program daripada Kementerian Agama untuk bisa menjadikan orang-orang yang selama ini antreannya begitu panjang dan kemudian tertunda, bagaimana ini bisa tertuntaskan dalam waktu secepat-cepatnya? Tentu kami berharap. Bagaimana kalau bisa setahun itu berangkat semua kalau tidak mungkin ya bagaimana diupayakan untuk bisa segera berangkat agar mereka benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah menjadi keinginannya menjalankan ibadah haji.

Mengenai masalah lain-lain, tadi sudah banyak diusulkan oleh teman-teman dan saya yakin Insya Allah Gus Menteri juga tidak akan tinggal diam, bagaimana berupaya untuk jamaah haji ini mendapatkan sebuah keringanan yang tidak memberatkan bagi mereka, ya mungkin bisa berkomunikasi dengan BPKH seandainya ada tambahan-tambahan biaya, bagaimana jamaah haji itu untuk tidak dibebani biaya lagi. Itu saja harapan-harapan kami. Yang penting kami hanya berharap mudah-mudahan ini bukan hanya retorika tapi ini adalah sebuah kenyataan yang betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, akhirnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Insya Allah nggak retorika Bu, amin-amin Insya Allah.

F-PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR):

Amin, amin, amin.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Anisah Syakur dari PKB.

Kami persilakan dari Demokrat , Pak Nanang kami persilakan .

F-DEMOKRAT (Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Bapak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan tambahan kelengkapan informasi, dengan diizinkan kita masuk ke Saudi tentunya itu membuat suatu kebahagiaan. Namun dalam paparan tadi saya melihat, bahwa ada perbedaan antara vaksin yang digunakan di Saudi dan vaksin yang disetujui oleh WHO, ini menimbulkan pertanyaan karena hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sehingga mohon penjelasan apakah vaksin Sinovac itu masuk kategori yang digunakan di Saudi atau hanya disetujui oleh WHO tapi tidak digunakan di Saudi, karena ini erat kaitannya dengan masalah karantina. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu Pak Menteri dan paparan Pak Menteri langsung saya *share* di group saya itu, responnya banyak sekali yang menanyakan tentang ini mohon klarifikasi dari Pak Menteri kira-kira mengenai vaksin ini sebab karantina tiga hari itu sangat-sangat berarti bagi para jamaah umroh.

Kemudian yang berikutnya, menindaklanjuti apa yang disampaikan Ibu Selly tadi tentang aplikasi peduli lindungi dan Tawakkalna. Ini apakah bisa kita melakukan pendekatan sehingga cukup dengan aplikasi e-hac internasional di peduli lindungi yang sehingga tidak perlu lagi kita membuat yang lain-lain lagi. Karena kalau mengisi lagi aplikasi disana merepotkan bagi para jamaah, mana waktunya singkat dan mereka harus mengisi aplikasi yang bahasanya mungkin mereka tidak terlalu paham.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan haji, mungkin kami tidak akan membahasnya disini tapi nanti di Panja Haji. Harapan kami semoga MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi segera terwujud. Oh sekalian salam kenal Pak Dirjen, Pak Dirjen Haji salam kenal.

DIRJEN HAJI:

Salam kenal Pak.

F-DEMOKRAT (Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.):

Belum kenal. Kemudian yang berkaitan dengan isu-isu aktual ada beberapa. Pesanan dari teman-teman di lapangan status guru honor di pondok-pondok ini terutama berkaitan dengan *inpaassing* dan lain sebagainya mereka merasa dibedakan dengan guru-guru sekolah umum. Tadi juga dijelaskan oleh Bu Selly secara detail, bahwa kalau Komisi X itu gencar sekali memperjuangkannya. Mereka berharap minimal mereka ya diberikan alokasi yang memadai untuk diangkat menjadi Pegawai PPPK. Ini mungkin perjuangan Pak Menteri sangat ditunggu oleh para guru-guru sekolah madrasah dan di pondok-pondok ini.

Ada hal baru kami temukan di lapangan yang berkaitan dengan dana talangan setoran haji. Setelah Menteri Agama mengeluarkan larangan untuk

memberikan talangan bagi Pegadaian, bagi bank-bank untuk melakukan talangan bagi setoran haji, praktik di lapangan masih ada. Ini kami harapkan ada tindakan tegas dari Kementerian Agama untuk melakukan minimal teguran kepada lembaga-lembaga Keuangan tadi misalnya penggadaian kan.

Pernah kami temui pada satu saat kita sosialisasi pembatalan haji di ruang sebelah di hotel yang sama sosialisasi tentang dana talangan haji ini, artinya mereka memberikan kemudahan, kemudian dibungkus seolah-olah ini emas nilai dan sebagainya tapi ujung-ujungnya sama itu.

Yang terakhir ini permohonan, Pak Menteri kami Anggota Komisi VIII merencanakan kunjungan ke Maroko, tapi karena suatu dan lain hal terutama virus *Omicron* akhirnya di Maroko *close* selama dua minggu. Untuk itu kami merencanakan atas izin Pimpinan untuk memindahkan kunjungan dari Maroko ke Saudi. Mohon kiranya Pak Menteri berkenan untuk membantu kami membuatkan semacam calling visa. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Nanang Samodra dari Demokrat. Nanti kalau masih ada Anggota yang lain tetap saya kasih kesempatan ya. Kami persilakan dari Fraksi PKS Pak Kiyai H. Bukhori, silakan Pak Kiyai.

F-PKS (K.H. BUKHORI. Lc., M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Menteri dan seluruh jajaran.
Para Dirjen dan juga Dirjen Haji dan Umroh yang tidak nampak secara fisik tapi beliau nampak Pak Hilman Latif yang saya hormati.
Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendidikan, Pak Dirjen Bimas, dan juga dari Irjen dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Pak Menteri saya juga menyampaikan terima kasih atas paparan tadi, supaya menyingkat waktu, saya pertama pertanyaan dan beberapa yang disampaikan teman-teman dahulu tentu merupakan bagian daripada pandangan kami. Jadi mohon juga itu kemudian nanti mendapat respon yang memadai.

Yang kedua, terkait dengan dua hal yang ingin saya sampaikan yang paling mendasar, kalau umroh sudah kalau *suspend* kita sudah dicabut dan diizinkan mulai tanggal 1 Desember 2021 untuk pemberangkatan jamaah haji, nah tolong diinformasikan kepada kita ini tanggal 1 atau tanggal 2 Desember nanti kira-kira itu berapa jamaah yang berangkat. Saya kira itu penting atau kemudian di tanggal berapa akan memulai perdana supaya menjadi prototipe

bagi kita sekaligus menjadi satu contoh pada Pemerintah Arab Saudi yang selama ini menjadi salah satu basis kebijakan mensuspend kita untuk meyakinkan. Ini sangat penting karena ada kaitan dengan pelaksanaan haji.

Kalau kita sukses dalam menjalankan umroh ini, saya meyakini sepenuh hati Arab Saudi akan bisa memberikan keuangan secara leluasa kepada kita untuk menunaikan haji 22 nanti Insya Allah dan kami yakin sebagaimana teman-teman yang juga yakin bahwa tahun 2022 Insya Allah akan ada penyelenggaraan haji dengan menyertakan jamaah di seluruh dunia, meskipun kita belum tahu berapa kuotanya. Jadi saya kira mohon penjelasan, kira-kira ini fixnya ini kapan akan dimulainya dan jamaah darimana berapa jumlahnya? Itu yang paling pertama yang utama yang kami harapkan sebagai implikasi kepulangan Pak Menteri bersama dengan rombongan ketika ketemu dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi.

Nah yang kedua, jika kemudian rombongan satu dua sampai sepuluh itu sukses dengan baik, saya kira juga ada baiknya secara bertahap tidak hanya central pemberangkatannya dari satu embarkasi tapi bertahap. Jadi embarkasi katakanlah embarkasi dari Jakarta melalui Pondok Gede sukses, nanti bisa dari embarkasi yang lain. Jadi tidak semua seterusnya adalah putusan atau ketetapan satu, karena itu akan memberatkan kepada jamaah-jamaah. Kita masih punya waktu cukup Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni paling tidak 7 bulan karena Arab Saudi kalau dulu sampai ramadhan kalau sekarang sampai haji. Jadi 7 bulan untuk kemudian kita bisa mengirimkan jamaah umroh dengan prinsip yaitu mempermudah dan mempermudah saya kira itu saya kira penting tadi itu. Nah yang kedua Pak Menteri terkait dengan haji.

Kami si sebenarnya berharap bahwa kedatangan Pak Menteri di Arab Saudi dengan rombongan yang lalu itu sekaligus membawa berita tentang masalah MoU, tapi nampaknya memang juga belum mendapatkannya. Jadi nah karena ini kita dari Komisi VIII ini kan kalau dilihat dari sisi waktu ya pembentukan panja kan harusnya sudah kita bentuk di akhir November dan Desember, awal Januari paling lambat sudah kita tetapkan BPIH karena itu urutan dengan persiapan-persiapan. Tradisinya kalau persiapan selambat-lambatnya kan kalau dengan hitungan 221ribu atau 203ribu itu kan membutuhkan waktu 6 bulan, berarti kita tarik 6 bulan dari Juli kesini saya kira juga memang ya Desember itu sudah harus ada kepastian semacam BPIH-nya begitu. Nah karena itu kita di komisi ini dua tahun loss ini nggak tahu informasi sama sekali. Apa yang terjadi di Arab Saudi dan apa perkembangannya di Arab Saudi. Dan kalau kemudian nanti kita tiba-tiba membahas Panja Haji saya khawatirnya hanya satu pihak saja, hanya Pak Menteri beserta rombongan yang tahu informasi Arab Saudi saya kira.

ANGGOTA KOMISI VIII:

Harus Ketua.

F-PKS (K.H. BUKHORI. Lc., M.A.):

Harus Ketua, jadi saya kira ini juga perlu dibantu atau perlu kemudian kerjasama panja atau calon panja atau Komisi harusnya kemudian mengetahui secara *real* terhadap situasi yang berkembang di Arab Saudi pasti banyak persoalan atau banyak perkembangan, sehingga nanti perspektifnya beda, ada perspektif Pak Menteri sebagai eksekutif, perspektif kami sebagai pengawas atau sebagai legislatif, sehingga nanti dua perspektif itu ketemu dalam sebuah satu konsep di dalam panja.

Karena itu saya mengusulkan kepada Pak Ketua dan sekaligus Pimpinan, ada baiknya kalau kemudian dilakukan kunjungan segera ke Arab Saudi khususnya untuk kemudian menelusuri dan melihat secara langsung tentang situasi, dengan harapan kita punya positifisme bahwa 2022 Insya Allah akan diselenggarakan haji. Nah itu saya kira sangat penting dan tentunya kenapa saya sampaikan di sini, karena pasti ini ada kaitan dengan Kementerian Agama sehingga nanti ke Komisi kemudian berjalan kesana juga kemudian bisa dibantu dan bersama-sama dengan Kementerian Agama yang kemudian beberapa waktu yang lalu beliau sudah berhasil kesana gitu, itu yang kedua.

Yang ketiga, kaitan dengan masalah UPQ, inprinsip kami Pak Menteri kalau tidak salah saya secara pribadi dan Anggota dengan PDIP waktu itu Bu Selly, kami sudah kunjung memang ke UPQ yang ada di Ciawi ya dan itu memang memerlukan adanya pengembangan, tetapi kemudian ini perlu saya setuju apalagi tadi ada harapan setiap tahun mencetak 10 juta ini spektakuler sangat setuju sekali itu dan kita sebagai negara terbesar yang kebutuhan Quran itu kan minimal 2 juta per tahun dan itu 2 juta sementara faktanya Bapak cuma hanya punya 900ribu. Kemarin ketika kita, oh 2 juta Pak? 200? Ya salam, ya ini saya kira prihatin sekali ini padahal kalau kemudian itu diperlu itu dikeperluan itu hak asasi itu setiap warga yang beragama muslim khususnya misalnya. Ini saya kira ini untuk, untuk pengembangan kedua saya kira itu kami sangat setuju.

Namun Pak Menteri jangan lupa ada juga sejumlah calon-calon, bukan calon guru, guru-guru kita yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun yang mereka bergabung apakah guru-guru yang honorer maupun guru-guru yang sudah tersertifikasi belum *terinpassing* ini ratusan ribu. Ini saya kira juga menjadi prioritas utama, karena ini sumber daya manusia jadi jangan sampai nanti salah prioritas. Jadi dua ini saya kira setuju, UPQ setuju tetapi lebih penting adalah juga guru-guru yang kemudian mereka di madrasah yang jumlahnya ratusan ribu diseluruh Indonesia dan memerlukan terhadap apa kepastian mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Ini saya mendapat laporan dan pengaduan juga cukup banyak ini, ratusan ribu Pak Menteri yang tergabung di dalam FGSNI ini juga ada yang kemudian tergabung nanti guru-guru yang *inpassing*, tapi kemudian di apa namanya di sekolah bukan madrasah itu, ini juga mengalami banyak *problem*, baik itu *problem* persoalan masalah strata gajinya maupun, tunjangannya maupun *problem* terkait dengan masalah-masalah kurikulum yang kemudian mereka ajarkan ini juga

mengalami persoalan-persoalan. Saya kira ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian bisa diendorse diperhatikan menjadi sangat penting.

Saya kira itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan, tentu nanti kalau diberikan kesempatan waktu masih ada Pak Iskan untuk kemudian meneruskan dan Pak Iskan sedang keluar sebentar Pak. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Kiyai Bukhori. Kita gilir dulu per Fraksi Pak jangan merusak tatanan Pak.

Baik terima kasih sekali lagi Pak Kiyai Bukhori dari PKS. Kami persilakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan Pak Muhammad Rizal.

F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan Anggota Komisi VIII, serta yang Anggota Komisi VIII yang virtual juga.
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya Pak Dirjen, Pak Sekjen.

Yang pertama, tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena perjuangan Pak Menteri sudah menghasilkan untuk siapnya kita untuk berangkat umroh di dalam waktu yang dekat ini. Karena ini memang menjadi harapan masyarakat Pak, mereka kalau haji tidak bisa dilaksanakan kenapa tidak kalau bisa umroh juga bisa dilaksanakan.

Kemudian yang kedua, saya menanyakan tentang vaksin Pak. Ini kan vaksin yang beredar di kita sudah bermacam-macam ada Sinovac, ada *booster*, ada Johnson dan lain-lain. Vaksin yang kita gunakan untuk berangkat umroh khususnya ini menggunakan vaksin apa, yang, yang mungkin bisa diterima oleh Saudi? Jadi jangan sampai nanti setelah kita mungkin nanti di *screening* dulu disini vaksin apa yang menjadi yang dibolehkan di sana, itu yang pertama, yang kedua.

Kemudian berikutnya, memang setelah kita berangkat kesana pasti ada, ada interaksi antar jamaah di sana. Nah yang mengkhawatirkan kita kan kita tidak tahu jamaah yang ada di sana kan banyak dari berbagai negara. Setelah mereka pulang tiba-tiba mereka terkena juga menjadi positif. Nah itu kira-kira ini tadi sudah ditanyakan, sudah disinggung. Saya ingin tahu kira-kira kalau misalnya dia positif itu, kalau di sini kan hanya tiga hari karantananya

tapi kalau positif itu berapa hari? Apakah bisa satu minggu atau berapa, sampai selesai sampai positif? Nah ini tentunya membutuhkan biaya yang besar Pak, membutuhkan biaya yang besar sementara kadang-kadang jamaah umroh kita keuangannya juga terbatas, sampai sembuh gitu Pak kira-kira. Nah ini kira-kira siapa yang menanggung biaya kalau misalnya ternyata setelah di PCR lagi dia positif, positif lagi dan sampai dia menjadi negatif.

Nah kemudian yang berikutnya, pertanyaannya perkiraan yang diprediksi oleh Kementerian Agama, kalau yang memenuhi katakanlah negatif semua kira-kira berapa biaya yang bisa diperkirakan untuk jamaah umroh, karena mereka paling tidak harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pada saat melaksanakan umroh tersebut. Nah ini yang perlu saya pertanyakan.

Kemudian yang berikutnya Pak Menteri, terkait dengan pencetakan Alquran. Kami merespon positif bahwa pencetakan ini sangat penting karena kami menemukan ada sekarang beberapa Alquran yang dicetak yang sudah mulai kehilangan keasliannya. Misalnya ada beberapa ayat yang dikurangi, kami banyak menemukan dan banyak informasi itu. Jadi kalau Kementerian Agama mencetak yang sangat banyak, katakanlah bisa kita lakukan disebarkan kepada seluruh orang-orang yang beragama Islam tentunya. Jadi menghindari adanya Alquran-Alquran yang ya dalam tanda kutip tadi yang sudah dikurangi ayat-ayatnya. Nah ini saya kira mungkin ini perlu kami mendukung penuh mengenai pencetakan Alquran ini.

Kemudian Pak Menteri, tadi juga sudah disinggung ini PR juga bagi kami Pak Menteri yang terkait dengan pernyataan Gus Menteri yang beberapa sebenarnya, saya ingin tidak mau mengangkatnya tetapi ini PR juga bagi kita. Kalau kita tidak mempertanyakan kami sudah dapat penjelasan mungkin melalui media dari Pak Menteri terkait dengan Kementerian Agama itu hadiah untuk NU. Ini saya, saya kutip saya supaya tidak salah "*Bukan untuk umat islam secara umum tapi spesifik untuk Nahdlatul Ulama. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU*" Nah ini ya ini aspirasi Pak Menteri jadi saya sampaikan. Nah pernyataan ini menurut saya agak, agak ya katakanlah kontroversi agak dan bahkan sesuai dengan fakta sejarah juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak pas menurut kami. Karena misalnya setelah saya mencoba untuk mencari data sejarah ternyata misalnya Menteri Agama pertama itu saya koreksi tadi adalah dari, dari Muhammadiyah yaitu Dr. H. M Rasjidi dia tokoh Muhammadiyah. Jadi mulai dari jadi kalau misalnya Pak Menteri mengatakan misalnya, kemudian Menteri Agama sebelum Gus Menteri itu juga bukan dari NU, dari kalangan TNI beliau.

Nah, jadi saya kira itu terkoreksi Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi untuk mengingatkan Pak Menteri di kemudian hari karena Gus Menteri adalah pejabat publik yang memang harus hati-hati menyampaikan hal ini, sehingga tidak memecah belah antara kita.

Kemudian yang kedua, ada pernyataan yang dibawa saya kira. Ini mungkin bagi pejabat yang ada di bawah itu akan membuka peluang kalau

misalnya itu adalah kesempatan katakanlah hadiah untuk NU berarti ada kecenderungan misalnya untuk melakukan pengelolaan, misalnya pengelolaan keuangannya khawatir saya khawatir akan dilakukan mungkin semenah-menah, nah ini membahayakan saya kira Kementerian Agama, karena akan menjadi sorotan masyarakat atau sorotan dari pihak-pihak lain misalnya dari pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, atau pun KPK bahwa ini ada peluang-peluang yang dibuka oleh Menteri, padahal ini tetap dilakukan secara ketat pengaturan-pengaturan keuangannya.

Saya kira ini menurut saya ini, saya berharap Gus Menteri ke depan juga untuk berhati-hati karena Gus Menteri adalah pejabat publik yang kami juga mencintai Pak Menteri, kami menjaga juga kredibilitas Pak Menteri, tapi kami juga berharap supaya ke depan untuk lebih berhati-hati. Saya kira itu Pak Ketua dari kami. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Muhammad Rizal dari Fraksi PAN, terakhir dari Fraksi PPP, silakan Pak Kiyai Muslich.

F-PPP (MUSLICH ZAINAL ABIDIN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada saudara Ketua, Bapak Ketua, dan para Wakil Ketua.
Kepada rekan-rekan Komisi VIII yang kami hormati.
Gus Menteri beserta jajarannya juga yang kami muliakan.

Yang pertama, yang paling utama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena sukses dan tidaknya suatu bangsa ini adalah pandai bersyukur atau tidak, maka kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda *khoiru ummah nabia rohma shohibul safa'ah ila yaumil kiyamah* semoga kita digolongkan umat Muhammad yang mendapat syafaatnya, Aamiin. Yang ketiga langsung saja saya. kepada

Bapak Menteri yang kami hormati.

Pertanyaan yang pertama, mengenai pelaksanaan umroh karena ada beberapa ketentuan baru mengenai tes PCR dan karantina, saya berharap hal itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap ongkos umroh. Dalam arti harga umroh masih dalam takeran wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Kemudian yang tadi disampaikan kalau umurnya itu sudah 70 ke atas tapi ternyata mereka itu sehat ini banyak loh, yang umur 40 endak sehat tapi 70 sehat, ini banyak ini yang perlu padahal dia sudah beberapa tahun tanya terus masalah umroh itu. Mohon maaf itu Pak Mu DPR Jenderal itu, itu kan Kanwil juga, padahal dia badminton saja dua set single kuat sementara Gus Menteri belum tentu kuat itu, dua set *single* kuat, terus bagaimana solusinya itu Gus Menteri ini perlu ini kita tanya kita sampaikan?

Kemudian yang kedua terakhir, terkait dengan pelaksanaan haji 2022. Saya sangat berharap agar Kemenag sangat menaruh perhatian serius agar Indonesia tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji, jangan sampai kita absen lagi karena antrian sudah sangat panjang ini. Maka dari itu persiapkanlah pelaksanaan haji bisa dilakukan mulai sekarang. Jadi seharusnya kan apa yang disampaikan oleh *almukarom* Bapak Kiyai Bukhori itu kan sudah harus bentuk Panja Haji, persiapan ini kan belum ada apa-apa ini mohon kepada Gus Menteri ini.

Kemudian mohon apa yang disampaikan kepada kawan-kawan tadi, ini perlu memang kita itu kan pejabat publik di eranya Pak Menteri termasuk DPR pun juga pejabat publik. Maka kalau apalagi situasi yang prihatin seperti ini pandemi sangat memprihatinkan, jangan sampai dengan pernyataan kita tidak hanya Pak Menteri membuat bingung masyarakat. Masyarakat sudah susahlah jangan sampai ditambahi susah itu jangan itu.

Kemudian yang terakhir, langkah apa dari Gus Menteri ini dan jajarannya untuk masalah para pejuang-pejuang guru yang tadi sudah berulang kali kita sampaikan, ada yang perjuangannya sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang baru 10 tahun sudah bingung ini karena apa tiap bulan honorinya cuma 250ribu. Bahasanya untuk *pupur* saja tidak cukup maka pertanyaan saya sampai mana langkahnya untuk memperjuangkan para honorer guru ini benar-benar bisa walaupun tidak sama dengan pegawai negeri tapi dia sudah bisa menikmati, jangan sampai selalu dan selalu mereka prihatin .

Karena apa? mohon maaf ini mungkin dari rekan Komisi VIII semua sudah berjuang. Pernah dulu masalah *inpassing* dan sertifikasi dulu itu juga kan ada yang tiga tahun, empat tahun, ada yang baru sepuluh tahun kita bareng-bareng berjuang sama Kementerian Agama kemudian anggaran ditambah 4,6 triliun itu pernah. Itu melihatnya Pak Ketua belum ikut itu ya itu. Nah ini langkah apa yang sudah dijalani oleh Kementerian Agama untuk memikirkan para pejuang itu.

Yang paling terakhir, apa yang disampaikan tadi tentang masalah mencetak laporan. Ini perlu hati-hati ini jangan sampai karena kalau almukarom si mbah Kyai Bisri, Eyangnya Gus Menteri ini termasuk mohon maaf ini Abahnya ini kan mohon maaf ini berjuang bersama saya itu. Ketika waktu itu kalau izin itu kan dari Lurah, Camat, kemudian Koramil, Polsek, Sospol, Kodim. Pernah ketika itu saya ketemu Anshor Pak Gus Menteri di Kabupaten Magelang, harlah di alun-alun itu karena keliru ngomong

sebetulnya endak keliru cuma dibuat keliru saja. Itu Mbah Kholil, bawa ke Kodim yang menyelesaikan saya loh itu mohon maaf loh ini. Ini kata beliau kalau Quran ini kan ditambah, dikurangi, dirubah kan endak boleh itu. Dimana Quran ditambah, dirubah, dikurangi hukumnya murtad ini, ini-ini kata Mbah Bisri. Termasuk hasil saya mondok juga begitu. Jadi Quran itu ditambah, dikurangi, dirubah hukumnya murtad berarti keluar dari Islam maka Gus Menteri harus bertanggung jawab kalau sampai nyetak Quran kok dikurangi ditambah termasuk Gus Menteri murtad juga itu nanti. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Kyai Muslich, yang pejuang umur 65 tahun ke atas ya, luar biasa. Tadi kita nggak terpikir itu Kyai Muslich tapi karena Kiyai Muslich yang ngomong langsung terpikirkan itu ya. Ya baik sebelum ke meja Pimpinan ada dari Anggota?

ANGGOTA KOMISI VIII:

Saya Pak.

KETUA RAPAT:

Ntar saya bagi dulu ini, Ibu Endang dulu, baru ke sebelah sini Pak Jefry, balik lagi kesana nanti Pak Samsu Niang, dan Pak HBA. Silakan Bu Endang.

F-GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Iya terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VIII.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar saya perpanjang dulu waktu, ya tadi kan sampai jam 12 sekarang sudah jam 12.05, sampai jam 13 maksimal ya. Oleh karena itu mohon para pembicara atau penanya berikutnya mohon waktunya diperhatikan. Kita perpanjang pukul 13.00.

(RAPAT : SETUJU)

F-GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Oke terima kasih.

Gus Menteri beserta seluruh jajarannya.

Untuk menyingkat waktu saja saya hanya menambahkan, banyak hal yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan mengenai masalah haji dan di tahun 2022, kemudian kenapa kita belum, belum membentuk panja. Besar harapan kami apa yang sudah disampaikan Gus Menteri, kita tetap harus mempersiapkan untuk pembahasan anggaran, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Gus Menteri bahwa sudah ada skema perencanaan besaran daripada biaya haji. Nah oleh karena itu tidak ada salahnya kita segera bahas, sebagai bahan untuk persiapan kita berangkat atau tidak itu tetap harus segera dibahas dan harus segera disampaikan kepada Komisi VIII, sehingga ketika masyarakat menanyakan setidaknya ini sudah *prepare* harapan kita seperti itu.

Kemudian yang kedua, mengenai masalah guru. Jadi ketika kita turun ke masyarakat baik dalam kunjungan peseorangan atau pun kunjungan spesifik banyak disampaikan oleh para guru-guru, baik yang dari Kementerian Agama maupun yang tidak, tetapi yang paling banyak dikeluhkan adalah mengenai kalau dari guru agama di bawah jajaran Kementerian Agama mereka merasa terdiskriminasi Pak Gus Menteri. Jadi merasa belum ada perjuangan yang signifikan kepada guru-guru, karena apa? Karena kalau mereka yang baik apa mengabdikan atau WBA atau K1, K2 atau PPPK yang di jajaran Kemendikbud segala sesuatunya itu lancar jaya ibarat toll, tetapi yang di Kementerian Agama ini justru tersendat. Nah ini besar harapan kita menjadi perjuangan utama dari Kementerian Agama bersama dengan Komisi VIII, bagaimana mencarikan solusi itu mengenai yang guru-guru.

Kemudian mereka juga menyampaikan, bahwa mestinya pembinaan guru-guru agama yang di swasta ini harus tersentral menjadi satu, karena apa, kan menjadi, menjadi tidak baik perbincangan di daerah-daerah yang kita kunjungi itu ternyata justru membuat situasinya bukan semakin mendukung, terlebih lagi kondisi saat ini *multiplayer* efek ya karena tidak di bawah pembinaan Kementerian Agama, ya tidak ada fungsi kontrol yang jelas. Mereka mau menyampaikan apa kurikulumnya ya semau-maunya ini menurut para guru. Jadi kita berharap itu nanti dari sisi regulasi Gus Menteri harus menjadi pemikiran juga Pak Dirjen. Jadi besar harapan kami ini ditangkap oleh Kementerian Agama jangan sampai nanti semakin, semakin kesana akan semakin sulit lagi. Karena memang jenjangnya saja, jenjang percepatannya saja dan perhatiannya juga sangat jauh berbeda.

Terakhirnya, terakhirnya mengenai kita mengapresiasi mengenai percetakan Alquran, karena apa pun pembinaan di masyarakat ketika ini dimudahkan dari Kementerian Agama dengan memberikan stimulan dengan percetakan yang banyak, karena dicetak oleh Kementerian Agama besar harapan kami ini adalah tidak ada kesalahan, maka bagaimana pembinaan berkelanjutannya di masyarakat. Jadi dari Alquran itu kita berharap masyarakat dari sisi pembinaan agamanya semakin lama semakin baik, karena terus terang melihat kondisi saat ini dekadensi moralnya bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk itu ditandai dengan banyak hal berita-berita yang ada di televisi mulai dari pembunuhan anak kepada orang tua, mulai dari perkosaan, mulai dari LGBT dan sebagainya sumbernya

adalah pemahaman agama yang tidak baik yang tidak holistik. Jadi besar harapan kami ini menjadi pemikiran utama dari Kementerian Agama. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bu Endang dari Fraksi Golkar. Kami persilakan Pak Jefri Romdony dari Gerindra.

F-GERINDRA (Dr. H. JEFRI ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M..M.):

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VIII, dan juga Gus Menteri beserta jajarannya.

Syukur *alhamdulillah* bahwasannya umroh sudah dibuka untuk negara kita ,walaupun Sinovac tidak termasuk vaksin yang diakui oleh Kerajaan Saudi Arabia. Berdasarkan data Siskopatuh yang tadi disampaikan oleh Gus Menteri itu ada sekitar 59ribu calon jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya dan ada sekitar 18ribuan calon jamaah umroh yang sudah pegang visa umroh dan siap berangkat. Mohon dijelaskan lebih lanjut terkait vaksinasi dan juga jenis vaksinnya, apakah yang siap diberangkatkan itu vaksinnya sudah lengkap dan juga apakah semuanya sinovac, ini saya kira penting untuk ditanyakan karena untuk Pfizer dan juga Moderna ini treatmentnya akan berbeda. Dan juga pemetaan vaksin 41 calon jamaah umroh yang belum pegang visa umroh.

Kemudian terkait dengan pembahasan bersama PPIU tentang kebijakan *one gate policy*, dalam skenario penyelenggaraan umroh sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Gus Menteri ada yang perlu diperjelas lagi itu tentang asosiasi PPIU dan juga dasar dijadikannya diadakan pembahasan bersama dan juga ini siapa pihak yang diserahkan untuk mengatur mekanisme tentang *one gate policy* ini, apakah Kementerian Agama langsung atau ada pihak ketiga?

Dan juga senada dengan teman-teman yang lain, terkait keputungan jamaah jika seandainya terkonfirmasi positif, ini siapa yang menanggung dan juga keputingannya itu nanti bagaimana. Ini tentunya harus diingat bahwasannya mereka juga warga negara yang wajib dilindungi, karena itulah skenario angka 2 ini saya kira harus ditambah huruf F dan seterusnya.

Kemudian terkait revitalisasi UPQ yang berstandar internasional dengan kapasitas produksi ditarget 10 juta Quran merupakan keniscayaan

sebagai negara dengan umat islam terbesar di dunia. Usulan Pak Menteri ini yang *ainul yaqin* dengan mencontoh percetakan Alquran di Madinah karena sudah berkunjung langsung adalah referensi yang patut dipertimbangkan dan disandingkan dengan percetakan lain. Soal mesin cetak adalah hal utama, juga kemampuan bertahan mesin cetak ini hingga 100 tahun, tapi itu hanya bagian dari sebuah percetakan *as assistance*. Terkait dengan itu juga dengan memperhatikan kebutuhan dana revitalisasi UPQ yang cukup besar dan agar kita lebih cermat dalam menimbang-nimbang, juga karena Komisi VIII juga punya tanggung jawab. Saya mengusulkan agar usulan revitalisasi ini kita dukung dengan membentuk panja revitalisasi UPQ. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami persilakan Pak Samsu Niang dari PDIP.

F-PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi.
Anggota Komisi VIII.
Pak Menteri.
Sekjen, Dirjen dan seluruh jajarannya.

Pertama kita saya apresiasi Pak Menteri bersama Komisi VIII yang telah berusaha untuk ke Arab Saudi, ini suatu hal langka yang strategis yang harus kita ajukan jempol. Dengan berangkatnya Bapak ke Arab Saudi dan diterima di sana itu pertanda bahwa ada tanda-tanda untuk ber umroh dan berhaji di masa yang akan datang, itu dulu hal yang pertama. Karena ini tidak mudah Pak, tidak mudah untuk masuk ke Arab Saudi. Jadi ini yang patut kita ajukan jempol bahwa Pak Menteri sudah bekerja keras dan berusaha keras untuk melakukan negosiasi terkait perhajian dan umroh dan sudah ada hasil karena sudah diterima itu.

Jadi mengenai haji, saya kira kalau kita semua seluruh Indonesia ini mau berhaji tergantung yang di sana mau terima atau tidak kan begitu logikanya itu dan Pak Menteri sudah melakukan negosiasi dan bekerja keras dan saya yakin dengan negosiasi itu nanti diperkirakan ada hasil. Jadi tinggal kita menunggu hasilnya keputusan di sana bukan kita yang menentukan, yang di sana menentukan. Jadi saya kira ini hal menggembirakan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sudah ada upaya Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan perhajian 2022 dan yakin, saya yakin Insya Allah

itu akan terlaksana dengan dibukanya umroh 1 Desember nanti, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini hari tanggal 30 November tinggal satu bulan, berakhir anggaran 2021 akan memasuki 2022. Saya melenceng sedikit, bahwa harapan saya jangan lagi ada Silpa nanti di Kementerian Agama baik Pendis, Sekjen, Dirjen Bimas Islam, dan lain-lain sebagainya. Kita mau masih ada waktu Komisi VIII Pak Menteri siap membantu Pak untuk menyelesaikan program-programnya di Kementerian Agama. Ya siap membantu, misalnya di Pendis mungkin masih ada pesantren, madrasah yang belum disalurkan, mari kita bantu bersama-sama Pak Komisi VIII. Jadi ini masih ada waktu sedikit, kita tidak mau nanti ada realisasi anggaran tidak tersalurkan sekian banyak itu, sementara banyak masyarakat sekarang ini membutuhkan anggaran itu. Jadi Komisi VIII siap membantu Bapak. Begitu juga Dirjen Bimas Islam mungkin ada masjid, ada mushola, ada majelis ta'lim yang tidak tersentuh mari kita bantu Pak, untuk bersama-sama membantu ke lapangan gitu. Jadi ini yang paling pokok ini karena waktu tinggal satu bulan kita kasihan Pak kalau ada uang tidak tersalurkan ke lapangan, ya itu-itu yang paling utama itu.

Ini, ini harapan saya kepada Pak Menteri jadi endak usahlah kita bicara panjang itu terkait apa statement dan lain, yang jelas kita sekarang bagaimana kita membantu Kementerian Agama dan DPR bersinergi untuk secepatnya tidak ada lagi anggaran yang tidak terealisasi, itu, itu yang itu yang, itu yang barang kali yang paling pokok kita bicarakan hari ini.

Terkait apa namanya UPQ untuk 10juta per tahun itu kecil Pak kecil sekali itu. Penduduk kita ini umat islam terbesar di Indonesia ini kecil kalau 10juta, 10juta, 30juta itu baru nendang Pak itu. Ya itu saya kira itu kita, kita *support* itu yang lebih bagus itu Pak. Jadi saya kira ya Pak Ketua barangkali itu yang paling utama kita membantu Kementerian Agama untuk menyalurkan kalau masih ada sisa-sisanya yang tidak tersalur kita sama-sama menyalurkan ke lapangan Pak, termasuk sosialisasi apa dan yang lain sebagainya itu yang perlu melibatkan Anggota DPR sebagai narasumber itu barang kali yang paling penting. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Samsu Niang. Tadi mau saya taruh terakhir memang pembicara pemungkas memang tadi itu tapi sudah disampaikan oleh Pak Samsu Niang. Ntar, Pak HBA dulu setelah itu Pak Achmad.

F-GOLKAR (Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):

Saya Pak izin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua, Bu Wakil Ketua, para Anggota Komisi VIII, Pak Menteri beserta para jajaran Kementerian Agama. Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama sebenarnya tidak nanya beda dengan pernyataan teman-teman terdahulu Pak Menteri tapi ini ingin memuaskan hati kami ya. Pertama terima kasih atas perjuangan Pak Menteri dan Pak Ketua Komisi VIII kemarin kami mengikuti perkembangannya ketemu dengan Kementerian Urusan Haji Mekah dan Gubernur Mekah. Dan mudah-mudahan ini rasa kebahagiaan ini tentunya dari semua travel yang ada di Indonesia menyambut baik dan kebetulan saya dulu mau berangkat juga sudah bayar uangnya, sudah menawarkan saya untuk berangkat pergi ke umroh ke depan ini. Memang sama dengan teman-teman terdahulu Pak Menteri andaikata terjadi pertama karantina, yang dipermasalahkan para travel itu minta diperjuangkan uang untuk karantina itu, itu kan tidak dianggarkan kepada jamaah haji kita jamaah umroh kita gitu. Mereka itu apalagi nanti andai kata positif apa yang dikatakan teman-teman terdahulu tadi. Tolong betul itu apakah ditanggung yang Pemerintah atau dibebankan kepada jamaah umroh, sebab jamaah umroh kita ini kadang-kadang uangnya pas-pasan juga gitu kasihan mereka gitu, ini perlu menjadi perhatian kita ke depan.

Kemudian yang kedua, kami ingin mempertegas masalah UPQ ini Pak Menteri dan saya ada teman mantan pejabat utama juga itu mengirim WA kepada saya Pak, dia menceritakan pernah saya sampaikan dengan Bapak dulu bahwa ada penyimpangan dalam penulisan Alquran. Ini malah Alqurannya dikirim kepada saya. Nah yang diterbitkan oleh seorang Agung yang di dalamnya tidak terdapat surah Al-Maidah ayat 51 sampai 57, sengaja dihilangkan dan tolong disebarakan agar semuanya umat muslim mengetahui.

Ada satu lagi ada orang Islam beli Alquran cetakan terbaru, ada empat surah palsu ciptakan kafir *laknatullah* itu kata teman saya Pak ngomong, pertama Al-Iman, kedua Al-Wasgaya, yang ketiga Al-Tasajud, yang keempat Al-Muslih As-Muslim Muslim sebarkan *post*-nya itu. Beliau mengatakan mau menghadap sampai kepada Pak Menteri. Ini pengawasan Alquran ini perlu sekali menjadi perhatian kita ke depan. Nah dengan ada UPQ ini kalau memang ada percetakan-percetakan yang melakukan percetakan seperti ini kita *blakcklist* saja Pak, kalau perlu memang diambil tindakan sesuai dengan Perundang-Undangan Hukum yang berlaku gitu.

Itu yang dari teman saya, saya tidak sebut namanya beliau termasuk orang penting pada saatnya dulu, sekarang sudah pensiun, itu yang kedua. Oleh sebab itu mungkin pencetakan ini saya pikir ini potensi baik ke sisi ekonomi juga dilihat dari sisi ekonomi posisi lainnya. Kita punya penduduk yang cukup besar jangan sampai ada pencetakan Quran yang dari luar negeri datang masuk ke Indonesia ini. Oleh sebab itu sekali lagi kami mendukung sepenuhnya rencana pencetakan atau pengembangan UPQ ke depan.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, mungkin selaku dari sisi umur saya mungkin lebih tua 69 tahun, masalah pernyataan Pak Menteri apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya di Jambi itu menjadi Mustasyar NU. Saya tidak enak orang mengatakan Pak Menteri dari sisi umur sebagai adik, tolong betul mungkin pernyataan Pak Menteri itu tidak seperti yang dikatakan di dalam koran-koran dan media sosial, tapi mungkin sebagai yang tua dari Bapak mohon hati-hati untuk mengeluarkan pernyataan itu dan itu membahayakan sekali untuk kepentingan kemajuan dan persatuan umat ke depan. Pak Menteri itu jabatannya sangat manis sekali selalu dilirik orang gitu. Mulai dari dulu juga Menteri-Menteri Agama sebelumnya juga sampai hancur-hancuran dihantam orang gitu.

Jadi oleh sebab itu saya mengharapkan Pak Menteri, Gus yang saya sayangi ini ya tolong betul hati-hati, tolong kalau memang dijelas ya dijelaskan betul dengan di TV dan sebagainya tentang pernyataan Pak Menteri tentang NU itu. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Ibu Nur Azizah, terakhir Pak Achmad agak diselang seling gitu Pak.

F-PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah assholatu wassalamu'ala rasulillah wa ala alihi (suara tidak jelas) ama ba'du

Yang saya hormati Pimpinan rapat dan seluruh Pimpinan yang lain Komisi VIII dan seluruh Anggota.

Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan lainnya.

Saya langsung saja yang belum tersampaikan sama sekali kalau sudah si saya nggak pengen ngomong. Jadi tentu saya mengapresiasi seluruh paparan Pak Menteri dan juga tanggapan-tanggapan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua di Komisi VIII, yang satu ini adalah terkait pernyataan Kementerian Agama kalau nggak salah itu melalui Bapak Sekjen dukungan terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang terkait aturan di perguruan

tinggi yang sebetulnya itu adalah mirip dengan RUU PKS, yang dulu oleh Komisi VIII sudah ditolak begitu. Jadi intinya Permendikbud itu kan kalau kegiatan seksual atau macam-macamnya terpaksa itu yang nggak boleh, kemudian efeknya adalah kalau suka sama suka berarti boleh, itu sangat melukai dan merusak umat Islam tentunya. Terus terang kalau saya kemarin ke Dapil itu otomatis yang ditanyakan nggak ada dukungan itu saja, LGBT pergaulan bebas itu sudah nggak karu-karuan, apalagi kemudian Permendikbud Nomor 30/2012 di dukung oleh Kemenag ya ini seperti apa begitu selanjutnya? Padahal pada Raker Kemenag, Pak Sekjen dan Eselon I tanggal 27 bulan September hari Senin 2012 saya sudah menyampaikan bahwa Kemenag ini adalah soko guru rakyat Indonesia, yang diharapkan bisa mengantarkan rakyat Indonesia ke surga semuanya itu saya sampaikan waktu itu.

Eh kok belakangan ada pernyataan ini gitu kan, kemudian sayangnya jadi wah gimana ya ini gitu, padahal ya saya si nggak, nggak apa ya tentu kalau Anggota Dewan MPR ini kan sudah mengikuti awal-awal dilantik kemudian dan sampai sekarang menyampaikan sosialisasi empat pilar terkait Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas disana kan bahasa Indonesia harus menyembah Tuhannya beribadah menurut agama dan kepercayaannya, kemudian bahasa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya, itu diantara intisari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga yang jelas Permendikbud Nomor 30 Tahun 2012 ini menyalahi Pancasila dan tentu ya tentu apalagi sekarang tadi sudah mendisampaikan oleh Pak Menteri, ada UPQ yang akan apa namanya mencetak berapa ribu, berapa puluh ribu yang tentu tidak hanya ya tentu saya gembira dengan pencetakan ini tapi mudah-mudahan isi Alquran ini dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau umpamanya contoh surat Al-Kahfi itu kan sunah dibaca kalau hari Jumat, akan memberi cahaya sampai Jumat berikutnya itu hadistnya. Saya baca apa namanya Al-Kahf ayat 103 sampai 106 tentu ini menjadi kewaspadaan kita semua

Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala () alladzina dholla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna shun'a. Nah ini, Ulaaa'ikal laziina kafaruu bi aayaati Rabbihim wa liqoo'ihii fahabitat a'maaluhum falaa nuqiimu lahum yaumul Qiyaamati waznaa, Zaalika jazaaa'uhum jahannamu bimaa kafaruu wattakhazuuu Aayaatii wa Rusulii huzuwaa

Nah ini ayat ini sangat mirip kalau kita perhatikan supaya ya tidak hanya Kemenag, tapi kita semua harus hati-hati jangan sampai kita berbuat sesuatu yang seronok kemudian kita menganggap itu perbuatan yang baik begitu. Nah ini tolong apa perlu diklarifikasi atau dan sebagainya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Ibu Anisa, eh Ibu Anisa lagi, Ibu Azizah Tamhid dari PKS. Terakhir Pak Dr. Achmad kami persilakan.

F-DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan serta Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran,

Pak Menteri saya tidak akan membahas masalah haji, karena itu akan dibentuk panja dan secara teknis kita panjang lebar membahas, tapi ada isu Pak Menteri yang mungkin perlu ditanggapi kenapa, tadi kita bicara teknis masalah umroh tapi ada persoalan kemarin beberapa asosiasi dari PPAU ke sini, itu menyampaikan bahwa mereka sudah memakai dana setoran dari jamaah hajinya, jamaah umrohnya karena mereka tidak mau mem-PHK atau memberhentikan staf karyawannya. Lalu untuk operasional selama dua tahun itu, itu dipakai setoran daripada apa namanya calon-calon umroh ini. Selama dua tahun mereka tidak berangkat tapi itu digunakan. Nah ini mereka kemarin menyampaikan kami tidak ada kalau seandainya nanti umroh dibuka Pak kami tidak punya dana memberangkatkan sedangkan mereka sudah setor kami sudah pakai nah itu persoalan Pak. Nah ini perlu mungkin kita *clearkan* kenapa, ini akan menjadi bisa bola liar ini jadi perlu kami informasikan. Mereka kemarin minta itu supaya ditanggung oleh Pemerintah maka kita waktu itu tidak setuju gitu. Tidak keberatan, dia yang membuat kebijakan lalu dibebankan oleh Pemerintah, nah ini kami pertama Pak Menteri.

Yang kedua, menyambung apa yang disampaikan Bu Selly tadi masalah guru agama kita. Nah mungkin kita tidak bicara guru agamanya Pak Menteri tapi kita bicara keadilan. Keadilan antara guru umum dengan guru agamanya. Jadi proses keadilan ini kalau keadilan berarti universal berarti sana keadilan Pancasila bicara. Nah kalau bisa mengangkat program PPPK itu satu juta kita kemarin hanya 35ribu nah keadilan bicara di sana. Kalau keadilan bicara, Menteri Keuangan, Bappenas dan semua tidak bisa menolak. Jadi isu keadilan yang kita bawa kesana bukan guru agamanya. Nah ini kami kira untuk membantu kita perjuangan supaya kuota daripada guru agama ini atau guru baik *inpassing* itu mendapat perlakuan yang adil di dalam Pemerintahan kita ini. kami kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Dr. Achmad. Sebelum ke Pak Menteri dari meja Pimpinan berturut-turut Ibu Diah Pitaloka, terakhir nanti Pak Ace. Silakan Bu Diah.

PIMPINAN KOMISI VIII/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M. Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan beserta para Anggota Komisi VIII. Bapak Menteri Agama Gus Men bersama jajaran.

Kepulangan Pak Menteri kemarin dari Arab itu ditunggu banyak orang Pak, jadi yang bertanya-tanya banyak gimana pembicaraannya, gimana hasilnya, ya *alhamdulillah* hari ini kita tema haji dan umroh itu sangat diperhatikan masyarakat dan ditunggu kebijakan barunya pasca covid yang kita memang belum ada keberangkatan lagi selama dua tahun ini, selain terakhir pemberangkatan umroh yang kemudian setelahnya di *cancel* lagi.

Saya ada beberapa hal yang mungkin juga melengkapi pertanyaan teman-teman. Pertama, secara garis besar kebijakan *one gate policy* itu, apakah *gate* disini artinya fisik artinya semua harus melalui portal asrama haji secara fisik atau kah itu kebijakan yang maksudnya semua harus di bawah koordinasi Kementerian Agama? Karena umroh selama ini kan beda dengan haji, nah artinya pintu masuknya semua melalui ranah manajemen di Kementerian Agama. Jadi tidak harus misalnya semua jamaah umroh kita menginap di Pondok Gede atau kah secara fisik memang harus menginap di Pondok Gede? Itu memang perlu dijelaskan. Apakah bisa di hotel tapi di bawah koordinasi Kementerian Agama? Misalnya.

Karena saya rasa daya tampung Pondok Gede apakah dikalkulasi berapa gitu kan, lalu juga kalau covid masih berjalan apakah masih dipakai covid, ini kan teknis ya tapi sekali lagi itu butuh kejelasan bagaimana sebetulnya *one gate policy* dari ujung ke ujungnya dari mulai pemberangkatan di daerah koordinasi antara travel umroh dengan tim dari Kementerian Agama yang me-manage kebijakan *one gate policy* untuk mengeluarkan jamaah umroh dari memberangkatkan dari Indonesia ke Saudi itu satu.

Yang kedua, mungkin kita ingin tahu juga hasil pengawasan kepada travel umroh, karena banyak keluhan memang sebagai sebuah entitas Badan Usaha banyak beberapa travel ini mulai mengalami persoalan *finansial*. Nah misalnya saya nggak tahu masuk pembicaraan juga nggak, menyangkut maskapai yang kemarin misalnya banyak travel sudah beli tiket tapi hangus gitu ya atau bisa ditukar voucher atau dengan maskapai di Saudi, maskapai Saudi bahkan belum ada kejelasan informasi apakah tiketnya bisa diganti atau tidak.

Nah ini kita ingin tahu juga Pak Menteri, bagaimana kebijakan yang kemarin misalnya para travel umroh ini sudah naruh uang di hotel di Saudi naruh tiket gitu kan, apakah memang itu hangus atau memang bisa kita perjuangkan gitu untuk kelangsungan Badan Usaha Umroh Travel Umroh ini. Dan bagaimana hasil pengawasan, tentu masyarakat juga ingin tahu kondisi terakhir dari travel-travel umroh yang secara *financial* masih cukup mampu atau secara *financial* misalnya sudah agak *collaps*, karena jangan sampai nanti juga masyarakat nggak ada mitigasi dalam memilih travel salah gitu. Jadi membeli tiket kepada travel yang performanya sudah tidak baik gitu sehingga tidak bisa berangkat lagi. Nah ini mungkin kita ingin tahu juga hasil pengawasan atau minimal pemetaan travel umroh yang dua tahun ini terkena dampak pandemi. Bagaimana sebetulnya dampaknya terhadap travel-travel umroh yang hari ini ada di tengah masyarakat dan bagaimana mungkin kiat-kiat dari Pak Menteri untuk memilih travel umroh bagi masyarakat?

Lalu ketiga, kalau berangkat umroh ini apakah ada kapasitas karena kan apakah semua langsung dibuka sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu berangkat atau kah ada batasan-batasan, berapa sebetulnya jamaah umroh Indonesia yang diterima visanya oleh Saudi, karena ini kan juga mengantri ya banyak travel mengantri dan kapasitas dan kondisi akomodasi di Saudi? Karena hotel di Saudi ini kan satu dua tahun ini juga kosong, mungkin perlu *guiden* juga patokan-patokan atau apa ya panduan ya panduan misalnya dalam kita memilih hari ini akomodasi di Saudi karena kita ingin tahu juga situasi akomodasi disana apakah tetap gitu ya seperti sebelum pandemi atau kah hari ini ada perubahan-perubahan, juga perubahan-perubahan.

Nah yang terakhir, mungkin apakah sudah ada kebijakan haji Pak Menteri jadi kebijakan haji dan umroh kan beda ya. Nah apakah ada pembicaraan pendahuluan kemarin dalam pertemuan di Saudi tentang bagaimana kira-kira potensi keberangkatan haji Indonesia, Insya Allah kalau kondisi pandeminya tadi virus *Omicron* itu tidak berkembang gitu ya semoga tidak ya. Semoga tidak dan kira-kira ada nggak pembicaraan awal mengenai menyangkut bagaimana nanti jamaah haji Indonesia.

Dan saya ada masukan mengenai Unit Percetakan Quran. Kita senang sekali tentu atas bantuan yang diterima oleh Indonesia, tapi kalau bisa mungkin supaya aksesnya mudah itu di Jawa atau di tempat yang populasinya itu tidak apa ya cukup padat gitu ya jadi distribusinya juga tidak repot. Jadi kalau bisa ya ditempatkan karena itu kan nantinya juga wisata religi di daerah yang juga gampang diakses oleh masyarakat. Nah mungkin itu salah satu pertimbangan dari kita. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bu Diah. Kami persilakan yang terakhir Pak Ace.

PIMPINAN KOMISI VIII/F-GOLKAR (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pak Ketua/Pimpinan, para Anggota, Gus Menteri dan seluruh jajaran Eselon I, II Kementerian Agama,

Pertama, tentu kami menyampaikan apresiasi atas misi yang telah dilakukan oleh Gus Menteri beserta jajarannya dalam memastikan umroh maupun haji di Arab Saudi dan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri melegakan, walaupun masih banyak pertanyaan yang harus dituntaskan terkait dengan baik umroh, haji yang ya masih menimbulkan tanda tanya kepastiannya gitu ya apalagi soal teknisnya.

Pertama dari segi umroh, tentu kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Gus Menteri 59.757 calon jamaah haji yang sekarang, calon jamaah umroh yang saat ini sedang tertunda keberangkatannya. Nah tentu ekspektasi kami mereka inilah yang harus kita prioritaskan untuk diberangkatkan. Hanya saja masalahnya adalah betulkah kuota yang diberikan kepada kita terkait dengan umroh karena pasti di Arab Saudi pun juga akan ada kuota yang diberikan menyangkut dengan pengaturan jumlah orang yang dibolehkan untuk memasuki Arab Saudi. Nah pertanyaan saya adalah apakah sudah ada kuota yang diberikan terkait dengan umroh ini, sehingga proses pengaturan di Indonesia ini kita bisa atur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah, kita harus mencari solusi soal itu?

Yang kedua, adalah saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Diah tadi, 59ribu itu asumsinya adalah mereka yang harusnya memang kan kita tahu, kaya kasus kemarin yang mau berangkat itu mereka berangkat bahkan sudah sampai di Jeddah, gara-gara ada kebijakan travel *banned* maka kemudian mereka balik lagi, itu kan artinya apa, tiketnya sudah dibayar oleh travel, hotelnya sudah dibayar oleh travel tapi jamaah umroh ini pasti akan nuntut juga kami juga pengen umroh walaupun kami sudah berangkat dan ini bukan salah kami gitu. Nah bagaimana dengan nasib mereka ini, apakah mereka akan diberangkatkan juga atau tidak?

Kita tidak bisa menjawab bahwa itu urusannya travel gitu ya, tetap saya kira Pemerintah harus hadir memastikan kepada mereka, itu kasus yang paling ekstrem. Yang dan saya kira bahkan ada juga kan kasus mereka sudah ada di bandara lalu mereka nggak jadi berangkat gitu. Nah sementara pihak travel itu sudah bayar-bayar. Nah pertanyaan saya gimana kita memastikan para jamaah calon umroh ini apakah mereka juga mendapatkan

hak tanpa harus membayar atau bagaimana? Nah saya kira Pemerintah harus mencari solusi terhadap nasib calon jamaah umroh yang seperti ini.

Belum lagi kalau kita bicara soal yang kedua ini adalah soal jamaah yang telah setor kepada perusahaan travel, tapi perusahaan travel kita tahu selama dua tahun ini kan mereka lagi sulit ini, uang jamaahnya dalam tanda kutip kepakai. Nah ketika para jamaah meminta kepada travel itu untuk diberangkatkan uangnya belum ada. Nah kira-kira bagaimana solusi kita solusi Gus Menteri dan kita harus carikan jalan keluar ya terhadap kasus-kasus seperti ini. Ini penting untuk dijawab karena kami pun juga ya mendapatkan masukan dari berbagai asosiasi terkait dengan pelaku usaha di bidang travel ini. Kita harus cari jalan keluar bagi mereka agar ya apa jangan sampai misalnya baik jamaah calon umroh, calon jamaah umroh itu sendiri harus kita perhatikan dan juga pelaku usahanya juga harus kita perhatikan.

Yang selanjutnya, adalah soal sejauh mana integrasi peduli lindungi dengan tawakkalna, eh tawakkalna ya namanya ya? Kemarin saya diundang Gus Menteri oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan konon kabarnya sedang ada pembicaraan antara Kementerian Kesehatan Arab Saudi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan saya kira sekarang ini aplikasi peduli lindungi seharusnya memang sudah terintegrasi dengan berbagai negara untuk kemudian termasuk dengan Arab Saudi sehingga di dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan umroh itu kita sudah tidak harus misalnya kalau Gus Men atau Pak Ketua Komisi I datang ke Arab Saudi kan cukup dengan *passport* gitu kan atau gelang khusus gitu sebagai visa kok, tapi kan kalau rakyat yang ribuan datang ke Arab Saudi mau nggak mau saya kira harus menggunakan aplikasi. Nah pertanyaannya apakah sudah ada proses integrasi antara peduli lindungi dengan aplikasi yang ada di Arab Saudi sehingga memudahkan bagi proses pelaksanaan penyelenggaraan umroh?

Dan yang terakhir, tentu kita berharap ya tadinya saya berharap Gus Men datang ke sana itu sudah MoU gitu ya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, sehingga ada ya walaupun ada secercah harapan gitu walaupun mungkin biasanya kan kita bulan November atau Desember ya itu sudah ada MoU untuk memastikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji antara Indonesia dengan Arab Saudi, tapi tentu kita pun juga tidak bisa memaksa Pemerintah Arab Saudi, karena mereka kan punya penilaian dan analisis sendiri terhadap kondisi pandemi apalagi sekarang ditemukan varian baru begitu. Dan kami tentu menginginkan ya kita segera menyepakati panja, Panja BPIH tetap saya kira harus segera dibentuk, baik dari Komisi VIII maupun dari Komisi, dari Pemerintah karena bagaimanapun dalam situasi seperti sekarang ini ya tentu harus punya kesiapan.

Saya terus terang saja sebelas kali Gus Menteri keliling Jawa Barat ditugaskan oleh Pak Dirjen PHU yang hadir disitu untuk mengikuti diseminasi dan banyak sekali ekspektasi dari masyarakat tentang penyelenggaraan ibadah haji ini terutama pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya soal apakah

untuk BPIH kita mengalami kenaikan atau tidak yang selama dua tahun ini terkena pandemi, ini kan pertanyaannya sulit. Kenapa? Karena mau tidak mau kan harus ada unit cost baru misalnya soal PCR lah, soal karantina, dan lain-lain. Nah ini menurut saya perlu ada kajian yang mendalam dari kita dan karena itu, maka Panja BPIH saya kira harus segera kita sepakati bersama, supaya ada waktu bagi kita untuk merumuskan bersama BPIH berapa nilainya dan kita seperti pada tahun yang lalu membuat skenario-skenario, jika misalnya keberangkatan 50%, 25%, 10%, 5% atau 2,5% itu semua harus di *exercises* oleh kita. Saya kira begitu Gus Menteri. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua. Baik Pak Menteri yang hadir fisik memang karena sudah kangen sama Gus Men ingin nanya semua termasuk dari virtual tadi satu orang. Oleh karena itu kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Menteri untuk menjawab atau merespons dari Anggota maupun dari meja Pimpinan.

Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Terima kasih. Izin Ketua jika diperkenankan karena ini udaranya seperti Madinah di waktu subuh, boleh saya ke belakang sebentar dan rapat di skors.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri. Menunggu Pak Menteri kita sapa dulu Pak Dirjen Haji ini ya Pak Prof. Hilman, coba di itu dulu di zoom dulu, silakan untuk memperkenalkan diri dulu sembari menunggu Pak Menteri hal-hal penting yang nggak bisa diwakilkan tadi

DIRJEN HAJI:

Hallo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Ketua Pak Yandri

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

DIRJEN HAJI:

Pak Wakil Ketua Bapak

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirjen Haji, Pak Jhon ini Pak Dirjen Haji silakan kita kasih waktu dulu.

DIRJEN HAJI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Ini pengenalan pengantar saja Pak, pengenalan pengantar nanti pengenalan lagi.

DIRJEN HAJI:

Iya *alhamdulillah* bisa bersilaturahmi dengan Pimpinan Komisi VIII dan mohon maaf saya masih dalam karantina, sehingga tidak bisa hadir di lokasi. Baru tiba tadi malam dari Saudi setelah berkunjung ke beberapa pihak dan Insya Allah saya kira ada banyak pertanyaan yang nanti akan direspon oleh Kementerian Agama dan tentu saja oleh saya pribadi dari hasil perbincangan-perbincangan dengan berbagai pihak maupun persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya nanti tiba waktunya Anggota dan Pimpinan rapat khusus dengan Dirjen PHU.

DIRJEN HAJI:

Iya siap Insya Allah segera.

KETUA RAPAT:

RDPU untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terima kasih Prof. Hilman.

DIRJEN HAJI:

Sama-sama.

KETUA RAPAT:

Ini ada juga Kepala Badan yang baru ini Pak Akil Ilham, silakan Pak Akil Ilham Ketua Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi VIII, Bapak Wakil Ketua. Ibu Pimpinan Ibu Diah dan para Anggota Komisi VIII DPR RI.

Perkenalkan nama saya Muhammad Akil Ilham, yang sejak 1 Oktober 2021 kemarin dilantik oleh Pak Menteri sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saya kira begitu dulu Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Terima kasih Pak Akil Ilham. Kemarin saya ikut acara di Banten secara daring karena masih karantina, pas mau pidato lampunya mati Pak Sekjen jadi belum sempat sambutan tempat karantinanya lampunya mati Pak Dirjen. Jadi memang susah karantina itu kita nggak bisa kemana-mana jadinya. Insya Allah lain waktu bisa bersama-sama Pak Kepala Badan dan nanti kita juga akan rapat khusus karena banyak isu tentang produk halal ini yang mesti kita tindaklanjuti. Ada juga ini staf khusus ini Pak Adung atau Mas Adung, Mas Adung Abdurahman Sekjen GP Ansor, ya Sekjen tetap itu ya, ini penerus. Tadi Pak Menteri sembari mewakili yang tidak bisa diwakili saya persilakan Pak Hilman tadi Pak Menteri.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Oh iya

KETUA RAPAT:

Sama Pak Akil Ilham untuk perkenalan.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Iya-iya.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri, kami persilakan.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Terima kasih.

Ketua dan Pimpinan, serta para Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Saya akan menjawab, mencoba menjawab semuanya secara utuh itu ya tidak satu-persatu, karena memang mohon izin setengah dua harus ada rapat dengan Wapres, jadi saya mencoba menyingkat saja.

Terkait dengan integrasi, pertama terkait dengan integrasi apa aplikasi peduli lindungi dan tawakkalna. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh beberapa Anggota termasuk Pimpinan Kiyai Tubagus Ace juga menanyakan tadi. Saya kemarin bertemu dengan Bu Menlu dan Pak Menkes kemarin, selain mengkoordinasikan hasil dari Saudi, juga menanyakan terkait apa yang kita tanyakan pada siang hari ini dan menurut beliau tidak lama lagi akan selesai proses *bridging-nya*. Jadi karena tim teknis mereka sudah bekerja selama sebulan, tim teknis peduli lindungi dan tawakkalna yang kemarin kita waktu di Saudi Pak Ketua ada tim datang itu finalisasi, tim finalisasi. Jadi sebenarnya secara prinsip mereka sudah apa, melakukan *bridging* itu supaya terintegrasi dan Insya Allah dalam waktu dekat begitu yang disampaikan ke saya. Dan mudah-mudahan kalau itu bisa benar-benar terintegrasi maka akan semakin mempermudah jamaah kita untuk bisa berangkat umroh itu ya. Dan kemudian tadi Bu Selly juga menanyakan dari 18ribu pemegang visa berapa yang bisa berangkat. Nah kalau bisa berangkat atau tidak itu memang kita masih dalam proses evaluasi secara menyeluruh

Bu Selly dan Bapak/Ibu sekalian yang terhormat.

Karena memang secara efektif kita baru bekerja kemarin sejak pulang dari Saudi. Kita sampai Indonesia Jumat malam dan karantina dan kemarin

baru bisa beraktivitas dan memulai kerja, apa yang kita dapatkan di Saudi. Jadi kira-kira kalau ditanyakan yang tertunda yang punya visa ini berapa yang bisa berangkat kita belum bisa jawab tetapi kita punya rincian secara umum gitu ya. Jadi yang pegang visa dan kemungkinan bisa berangkat kita bisa lihat dari statistik usianya yang kurang dari 18 tahun artinya dia tidak bisa berangkat karena peraturan umur itu ada 889 calon jamaah. Kemudian yang lebih dari 65 tahun itu ada 2.549. Nah sementara yang berumur dalam *range* yang diperkenankan untuk bisa masuk ke Saudi Arabia itu sejumlah 15.314. Jadi kira-kira nanti kalau skemanya adalah pemegang visa yang kita dahulukan maka kita akan saring dari 15.314 jamaah ini, kenapa disaring, karena Bapak/Ibu sekalian tadi juga sudah disampaikan bahwa apa umroh yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Jadi kalau kira-kira umroh kita berhasil Insya Allah haji juga akan terbuka.

Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 nanti itu ya tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah umroh ini dengan baik. Artinya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang sudah ada terdahulu misalnya ada PCR bodong, jadi kaya begitu-begitu tidak boleh ada lagi, kalau itu masih ada maka harapan kita semua harapan seluruh muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji ya mohon maaf akan semakin berat. Maka umroh ini menjadi kewajiban kita semua ya Pemerintah, DPR, terutama apa penyelenggara umroh ini untuk lebih serius dan presisi gitu ya, jadi sudah mereka benar-benar gitu mau menyelenggarakan ini dengan baik dan bertanggung jawab terutama ketaatan kepada protokol kesehatan.

Nah kemudian terkait *Omicron*, saya perlu jelaskan sedikit soal *Omicron*, *Omicron* ini saya coba buka data ya. Memang *Omicron* ini Bapak/Ibu sekalian ini cucu dari virus Covid-19 yang menurut kita, menurut data yang saya punya ini memang gimana ya perlu di khawatirkan tetapi tidak perlu berlebihan. Jadi kira-kira begini, data yang saya dapat dari Menteri Kesehatan *Omicron* ini memiliki kombinasi *co-mutation* atau mutasi berbahaya yang dimiliki varian konsen lainnya.

Jadi anak-anak virus Covid-19 itu masing-masing memiliki varian berbahaya. Nah varian-varian berbahaya dari anak-anak virus covid ini menyatu dalam *Omicron*, kira-kira begitu ini masih perkiraan semua. Kemudian *Omicron* memiliki potensi atau kemungkinan penularan tinggi dan penurunan efektifitas respon imun anti *body* yang sebelumnya terbentuk dari infeksi maupun vaksinasi. Jadi anti *body* yang sudah dibentuk karena pernah kena atau karena vaksin itu bisa dihindari oleh jenis virus *Omicron* ini, tapi tidak ada bukti keparahan itu tidak ada bukti keparahan yang tinggi dibanding varian *off consen* yang lainnya. Jadi dia menyebarnya lebih cepat tetapi tingkat keparahannya mild gitu jadi tidak terlalu kuat. Jadi kenapa kemudian tadi dikatakan Bu Selly misalnya kenaikan 500% sebenarnya bukan 500 kali ya, 500% di Afrika itu karena memang Afrika itu secara umum ya Benua Afrika itu baru 3,5% yang divaksin.

Jadi sangat jauh dibanding kita yang sudah 70-an% gitu ya. Jadi saya kira ya kita perlu waspada tapi tidak perlu khawatir terlalu berlebihan.

Indonesia terus mengantisipasi ini Pemerintah Indonesia dan hari ini melakukan *banned* terhadap beberapa apa namanya negara untuk bisa masuk ke Indonesia dalam rangka untuk mengantisipasi *Omicron* ini. Jadi sekali lagi bahwa *Omicron* ini kita waspada tapi tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, Insya Allah kita semua selamat selama kita menjaga protokol dengan baik dan tentu rajin berdoa dan menabung Pak supaya bisa pergi haji dan umroh.

Bapak/Ibu sekalian.

Kemudian apakah kemudian soal *one gate policy* itu diperlakukan hanya untuk jamaah Jakarta atau tidak seperti Pak Jhon tadi sampaikan, ya semua, semua melalui secara fisik seperti tadi ditanyakan oleh Bu Diah secara fisik akan masuk ke asrama haji, karena praktis memang kita belum bisa memberangkatkan jamaah umroh secara masif, secara masal, banyak belum bisa. Karena seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah bagian dari simulasi supaya meyakinkan Pemerintah Saudilah kira-kira bahwa kita ini siap dengan protokol, sehingga bukalah ini apa pintu haji untuk jamaah Indonesia begitu kira-kira.

Jadi tetap kita akan pilih sesuai dengan kesiapan kita dan Pak Dirjen Haji sudah berbicara dengan PPIU terkait dengan beberapa skenario-skenario yang akan kita gunakan. Jadi mohon izin kalau hal-hal yang teknis yang lainnya Bapak/Ibu sekalian, untuk sedikit bersabar atau membuat RDP supaya lebih *clear* itu ya karena sekali lagi mohon maaf praktis memang kerja baru dimulai kemarin, kita datang Jumat, Sabtu, Minggu kita karantina gitu. Jadi mohon sedikit bersabar tapi kalau mau dibuat RDP akan lebih saya kira akan lebih bagus itu ya lebih detail nanti hasilnya.

Kemudian soal bagaimana kalau ada yang positif, yang di Saudi ya sudah sampai Saudi kemudian di PCR positif yaitu nanti akan dihitung kalau diposisi kita dengan Pak Dirjen Haji itu akan dihitung dalam suatu paket biaya, biaya umroh ini Pak. Nah makannya nanti kita hitung bersama, nanti kita akan hitung bersama, karena ya saya paham nanti kalau dibebankan kepada jamaah sebagaimana tadi beberapa Anggota sampaikan jamaah juga ya banyak juga yang pas-pasan gitu. Dibebankan kepada PPIU ya darimana duitnya, ya kan. Dibebankan ke Pemerintah skemanya seperti apa? Nah ini kan saya kira masih kita perlu bicarakan bersama-sama gitu.

Kemudian soal MoU haji, ya sekali lagi tergantung pelaksanaan umroh kita dan MoU itu biasanya diselenggarakan di Minggu kedua Desember paling cepat Pak. Jadi MoU itu ya tergantung mereka Pemerintah Saudi Arabia jadi kalau mereka mengundang kita mereka yakin bahwa kita umroh ini bisa ya mereka akan undang kita untuk MoU. Nah Insya Allah umroh ini saya sudah minta ke Pak Dirjen Haji untuk bisa dibuatkan skema *as soon as possible* secepatnya. Jadi jangan terlalu lama ditunda ngitung ini itu, itu jangan terlalu lama ditunda, segera diberangkatkan supaya kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah sangat siap menyelenggarakan umroh berikut haji.

Di pembicaraan-pembicaraan kami bersama Pak Ketua ketika bertemu dengan Menteri Haji kita sampaikan bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ibadah umroh. Bukan hanya itu bukan hanya mengantisipasi umroh tapi dalam kehidupan sehari-hari pun Indonesia sangat patuh dengan patuh dengan protokol kesehatan. Buktinya angka covid Indonesia terus turun dan melandai sampai kemarin Bapak/Ibu kita ketemu gitu ya.

Nah itu kita sampaikan semua jadi untuk meyakinkan dan tadi ada pertanyaan kenapa ketemu Gubernur Mekah segala gitu? Saya mau ketemu Gubernur DKI sudah sampai sana Pak jadi ketemunya Gubernur Mekah supaya begini, Gubernur Mekah itu Ketua Komite Haji Saudi jadi dia punya otoritas yang sangat kuat, itu kuat untuk menentukan apakah Indonesia ini bisa ikut atau tidak itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua Gubernur Mekah ini ya Gubernur Mekah ini sepupunya Raja dan ketemu Gubernur Mekah itu seperti ketemu Presiden suaminya Pak. Pak Ketua ini ngerti bagaimana proses berliku-likunya nembus supaya bisa ketemu Gubernur.

Dan yang ketiga, Gubernur di Saudi itu berbeda dengan Gubernur di Indonesia. Gubernur itu atasannya Menteri langsung Pak, jadi Menteri itu di bawah Gubernur. Menteri di bawah Gubernur, jadi kenapa penting ketemu Gubernur itu. Jadi saya mau ketemu Gubernur Jawa Tengah juga jauh gitu Pak, jadi ya ya sudahlah ketemu Gubernur Mekah saja, sudah sampai sana kan dan *alhamdulillah* itu menjadi wasilah gitu ya. Jadi wasilah itu jadi sarana buat kita untuk akhirnya *suspend* penerbangan ini dibuka. \

Booster ya terkait dengan *booster* juga begini Pak. Dulu diawal-awal kita rapat juga kita sudah bicarakan kalau *booster* bahwa Saudi ini hanya mengakui empat vaksin *Pfizer, Astrazeneca, Johnson and Johnson*, dan Moderna. *Chinese* vaksin termasuk di dalamnya adalah *sinovac* yang kita pakai yang diakui oleh WHO itu tidak termasuk yang diakui oleh Saudi, artinya kalau tidak menggunakan empat vaksin ini yang diakui Saudi itu, tetap harus karantina tiga hari. Kecuali di *booster* dengan satu di antara empat vaksin yang di dan 14 hari *efficacy*-nya. Jadi 14 hari sebelum berangkat harus sudah divaksin dengan *booster* yang empat itu, satu di antara empat itu. Nah kalau tidak, kalau hanya pakai *Sinovac* yang sebagaimana sebagian besar dipakai oleh masyarakat Indonesia tetap harus karantina tiga hari, hari kedua kemudian di PCR, kalau hasilnya negatif dia bisa langsung umroh dan sebaliknya.

Nah soal pembiayaan seperti tadi ya sudah disampaikan, pembiayaan juga akan kita bicarakan nanti. Bu Lisda tadi soal *Omicron* saya sudah sampaikan di awal, kemudian *efficacy* juga sudah, tawakkalna sudah. Pesawat *direct* dari daerah saya kira sekarang masih belum mungkin Bu, sekarang masih belum ,mungkin jadi mudah-mudahan ke depanlah sambil kita berharap. Ini kalau semakin banyak jamaah kita bisa kita berangkatkan umroh gitu ya, pelan-pelan kan semakin banyak orang yang berdoa semakin makbul doanya gitulah kira-kira Covid segera hilang dan jamaah bisa berangkat secara normal mudah-mudahan. Bu Anisa batasan umur yang

mohon maaf Bu kalau saya yang mengeluarkan izin saya tidak akan membatasi karena Pemerintah Saudi ya. Ini bukan salah Bu Anisa saya kira tapi karena lahir terlalu cepat Bu termasuk Kiyai Muslich.

Kuota haji juga belum ada tanda-tanda meskipun kita sudah senggol-senggol, kemarin baik kepada Gubernur Mekah maupun ke Menteri Haji bersama dengan Pak Ketua tapi mereka masih mengelak-elak gitu, nanti kita lihat umrohnya dulu bagaimana gitu jadi masih belum ada kejelasan. Nah oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian tantangan kita memang bagaimana kita mampu menyelenggarakan umroh ini dengan baik. Itu tantangan kita menjadi tanggung jawab kita bersama saya kira, kalau umroh ini bisa diselenggarakan dengan baik maka sangat terbuka lebar gitu, ibadah haji juga akan bisa dibuka.

Nah soal kemudian apalagi ini, soal guru honorer. Jadi begini Bapak/Ibu sekalian, ini memang isu lama dan selalu kita bicarakan karena sama-sama menjadi konsen kita tapi mohon dimengerti ya bahwa sampai saat ini ya tunjangan tas *inpassing* ini memang belum ada di DIPA Kementerian Agama. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian catatan SK *inpassing* guru madrasah non PNS tahun 2021, draft SK *inpassing* sudah dibahas dan sudah kita sepakati dengan mengacu pada diktum dan norma *drafting* SK dari Biro Kepegawaian. Kemudian jumlah guru madrasah yang sudah disertifikasi tapi belum *inpassing* jumlahnya kurang lebih 100ribu 97 orang jadi masih lumayan banyak. SK *inpassing* ini belum bisa diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya mengingat anggaran untuk memenuhi kebutuhan tunjangan *inpassing* 100ribu 97 guru ini belum tersedia di DIPA APBN tahun 2021.

Nah di tahun 2021 Direktorat GTK Madrasah sudah mengusulkan anggaran tambahan di DIPA tahun 22 khusus untuk pemenuhan tunjangan *inpassing* bagi 100ribu 97 guru madrasah yang sudah sertifikasi. Mudah-mudahan pengajuan ini disetujui dan kita bisa mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh saudara-saudara kita guru *inpassing* ini. Nah kalau ini dipenuhi jadi kita memiliki asumsi kurang lebih memerlukan 1,56 triliun kebutuhan selama 12 bulan untuk memenuhi tunjangan guru *inpassing* ini per tahun berarti ya per tahun kurang lebih kita perlu penambahan anggaran 1 koma 1.564.800.000.000 tepatnya selama setahun. Jadi kan artinya begini kita kan harus *sustain* gitu kan tidak boleh hanya memberikan setahun kemudian tahun berikutnya tidak. Ini memang kuncinya ada pada kemampuan anggaran kita tapi ya meskipun begitu Bapak/Ibu sekalian kita akan bersama-sama sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak/Ibu sekalian untuk terus mengusahakan agar saudara-saudara kita guru *inpassing* ini juga mendapatkan haknya sebagaimana yang lain.

Kemudian Bapak/Ibu sekalian soal ini dulu apa *calling* visa tadi, *calling* visa Pak Nanang. Insya Allah saya sudah perintahkan Pak Sekjen untuk segera, untuk segera tindaklanjuti ke konsolidasi kita di sana untuk minta Pemerintah Saudi sana memberikan *calling* visa kepada Bapak/Ibu sekalian.

Sekali lagi kami ini hanya mengikhtikarkan Pak, keputusan ditangan Pak Ketua, tapi ya sudah dibuat Pak Sekjen suratnya sudah disiapkan mudah-mudahan bisa nanti kita akan dorong komunikasi informalnya. Kemudian sudah semua ya?

Lalu soal vaksin, nah soal vaksin ini memang jadi isu ya terutama begini. *Booster, booster* ini kalau kita sudah bisa misalnya Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk melakukan *booster* dan *booster* itu bisa kita lakukan satu di antara empat itu ya, ini biayanya dari mana. Biayanya dari mana, termasuk tadi sebenarnya menjawab kalau ada yang positif kemudian karantina biayanya dari mana. Tadi sempat kepikir kita dengan Pak Sekjen gimana kalau kita asuransikan saja, skemanya. Skema umroh diasuransikan jadi biar menjadi tanggungan asuransi. Nah itu nanti kita bahas di RDP Pak. Bisa saja menurut saya si itu menjadi *available* gitu ya mungkin itu, tapi coba nanti kita bicarakan lebih detail kembali.

Ini kemudian semoga tidak ada Silpa lagi Pak Samsu Niang. Sama Pak kita juga pengen begitu mudah-mudahan tidak ada lagi Silpa, kita akan bekerja keras Pak Samsu Niang sudah tidak ada tapi kalau toh ada nanti kita akan minta lagi Eselon I untuk melihat anggarannya masing-masing dan bagaimana supaya bisa di *push* cepat tidak ada Silpa.

Pak HBA yang soal karantina sudah, tadi soal taskhik. Soal tahsih Quran gitu taskhik Quran tadi disebut PT Suara Agung kita sudah cek ternyata ini kasus lama di Mei tahun 2017 dan PT-nya sudah di ben Pak. Jadi sudah itu isu-isu yang sudah lama dan sudah di sanksi Pak PT-nya ini. Memang ada kasusnya berarti kalau faktanya begitu. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi karena saya kuatir, kuatir di murtad-murtadkan sama Pak Muslich lagi, karena kalau ada yang keliru-keliru menjadi tanggung jawab Menteri Agama.

Nah itu saya kira dan soal dari Pak Achmad PPIU yang sudah dipakai dananya gitu, ya kita sudah bicarakan itu Pak Achmad nggak ada lagi, itu kita sudah bicarakan. Kemudian Bu Diah tadi OGP ini *one gate policy* ini apakah secara fisik atau, koordinasi fisik Bu. Jadi kita lakukan secara fisik jadi tidak bisa kemudian melalui tetapi dikoordinasi oleh Kementerian Agama karena ya itu tadi sekali lagi kita pengen *proper* dan membuktikan kepada Pemerintah Saudi bahwa kita bisa mengelola jamaah umroh ini dengan baik, itu.

Kemudian pengawasan terhadap travel umroh tentu kita akan lakukan, ya karena kita tahu seperti tadi disampaikan juga sudah banyak dana yang dipakai dan termasuk uang-uang yang hangus akibat tiket, hotel yang sudah di-*booking* tapi tidak jadi berangkat.

Soal kapasitas umroh tidak ada saya kira itu menjadi kewenangan Pemerintah Saudi karena mereka yang menerbitkan visanya jadi biar mereka yang membatasi. Kemudian soal pembicaraan pendahuluan dengan haji sudah, sudah, sudah ada pembicaraan tadi juga sudah saya sampaikan. Memang belum ada jawaban yang pasti karena tergantung bagaimana kita

mampu menyelenggarakan umroh ini dengan baik. Tadi Pak Ace juga menanyakan hal yang sama kurang lebih, integrasi ya integrasi sudah kita lakukan dan MoU mudah-mudahan bisa secepatnya.

Bapak/Ibu sekalian.

Tadi juga disampaikan beberapa nasihat, beberapa saran gitu kan terima kasih saran ini pasti akan kita perhatikan dan kita menjadi pegangan buat kita, buat saya terutama untuk lebih berhati-hati meskipun bicara di forum internal dan terbatas. Karena kita tahu sekarang kamera itu bisa seenak-enaknya dan bisa beredar semudah-mudahnya. Nah itu dinding bisa dinding bisa bicara Pak, kadang-kadang bisa jadi mulut, kadang-kadang ditelinga, kadang-kadang tapi nggak apa-apa ini sebagai catatan bagi kita bahwa forum internal pun harus hati-hati itu. Jadi itu kita akan hati-hati meskipun itu forum internal dan saya kira forum internal itu seperti, seperti yang saya sampaikan di beberapa media kalau kita lagi sama istri ya saya bilang di dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Itu kan bukan berarti yang lain kita tendang-tendang kan bukan.

Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak/Ibu sekalian, terima kasih atas seluruh perhatian, kritik, saran, dan tentu masukan-masukan yang sangat berarti untuk perbaikan kinerja kita terutama dalam melayani jamaah haji dan umroh. Mudah-mudahan jamaah umroh bisa kita bisa segera berangkatkan dan kita bisa selenggarakan dengan baik sehingga menjadi catatan baik dan membangun kepercayaan kepada Pemerintah Saudi agar ibadah haji juga bisa dibuka untuk jamaah kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Menteri atas respons atau jawaban dari semua Anggota termasuk dari meja Pimpinan. Sekarang kita masuki pada kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Mohon ditampilkan tapi sebelum saya bacakan sebagai informasi kepada para Anggota, dari tadi pagi saya dan Sekretariat Komisi sedang berkoordinasi langsung dengan Konjen di Saudi untuk Komisi VIII berangkat ke sana dalam waktu dekat. Jadi tadi sudah direspon oleh Pak Konjen, Insya Allah tidak ada halangan katanya dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan dari semua fraksi ada wakilnya sehingga kita dalam kerja panja nanti benar-benar merasakan situasi yang ada di Saudi Arabia. Mohon doanya Bapak/Ibu mudah-mudahan ini lancar.

Baik, kita bacakan Pak Menteri dan Bapak/Ibu para Pimpinan. Nanti setelah saya baca, mohon dikoreksi baik dari sisi makna maupun redaksi,

setelah itu tidak saya bacakan lagi sebagai sebuah kesimpulan. Draft, saya bacakan.

DRAF KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2021-2022
SELASA 20 NOVEMBER 2021.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas perkembangan kebijakan haji dan umroh, serta isu-isu aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh yang lebih berpihak kepada kepentingan calon jamaah, baik aspek pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan di antaranya:
 - a. Mempersiapkan calon jamaah umroh yang benar-benar siap sebagai duta bangsa agar tidak di-*suspend* kembali oleh Pemerintah Saudi dan melakukan sosialisasi kepada asosiasi penyelenggara penyelenggaraan ibadah umroh mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umroh di masa pandemi Covid-19.
 - b. Meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk kepastian teknis operasional penyelenggaraan ibadah umroh kuota dan skenario keberangkatan jamaah, prosedur *apply* visa umroh dan pemaketan layanan bagi jamaah umroh.
 - c. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan satgas Covid-19 khususnya dalam upaya pengintegrasian Sistem Komputerisasi Terpadu Umroh Dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kementerian Agama dengan aplikasi peduli lindungi dan sinkronisasi dengan aplikasi tawakkalna Arab Saudi.
 - d. Segera melakukan revisi KMA Nomor 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pada masa pandemi Covid-19 dan KMA Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pperjalanan Ibadah Umroh referensi masa pandemi,
 - e. Memastikan kesiapan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat pelaksanaan skema *one gate policy*.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi khususnya agar segera dilakukan MoU antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Republik Indonesia pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 hijriah atau tahun 2022 Masehi.

3. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia akan segera membentuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 hijriah atau tahun 2022 masehi untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.
4. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan umroh dan haji di masa pandemi.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan umroh dan haji di masa pandemi dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru Covid-19 atau tadi *Omicron*, namanya belum hafal karena cucunya terlalu banyak Pak.
 - b. Mendukung revitalisasi Unit Percetakan Alquran (UPQ) berstandar internasional, ini ada Pak Dirjennya Prof. Kamarudin.
 - c. Memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah direncanakan. Oh saya kira Pak Samsu Niang sudah tidak ada, masih ada ya.
 - d. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah tunjangan profesi guru dan *inpassing* guru agama non pns.

Kami persilakan dari Anggota dan Pimpinan, setelah itu saya persilakan dari Menteri Agama, ada dari para Anggota?

F-GOLKAR (H. JHON KENEDY AZIS, S.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Jhon Kenedy Azis.

F-GOLKAR (H. JHON KENEDY AZIS, S.H.):

Terima kasih Ketua. Pertama tadi tentang memprioritaskan tadi saya sampaikan Ketua kalau bisa juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian dan terhadap artinya hasil kunjungan kunker kita. Saya pikir itu yang.

KETUA RAPAT:

Tambahkan pointnya itu di point E.

F-GOLKAR (H. JHON KENEDY AZIS, S.H.):

Kalau nggak kita jadi macan ompong nanti itu.

KETUA RAPAT:

Betul-betul

Yang e meminta Kementerian Agama untuk memprioritaskan aspirasi dari hasil Kunjungan Komisi VIII di beberapa daerah gitu ya? Hasil Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di beberapa daerah.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Jhon?

F-GOLKAR (H. JHON KENEDY AZIS, S.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang lain silakan

F-PKS (K.H. BUKHORI. Lc., M.A.):

Itu kata-kata di beberapa daerah mungkin endak usah Pak.

KETUA RAPAT:

Apa?

F-PKS (K.H. BUKHORI. Lc., M.A.):

Kata-kata.

KETUA RAPAT:

Oh dihilangkan. Jadi aspirasi kunjungan kerja Komisi VIII itu saja? Oke baik, yang lain masih ada?

ANGGOTA KOMISI VIII:

Cukup.

KETUA RAPAT:

Cukup. Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Baik, baik Pak Menteri dan seluruh jajaran, para Anggota Komisi VIII, dan Pimpinan tanpa saya bacakan lagi ada beberapa perbaikan tadi draft yang saya bacakan kita ambil sebuah kesimpulan.

Saya minta persetujuan, apakah draft yang saya bacakan sudah mengalami perbaikan, bisa kita ambil sebuah kesimpulan dalam rapat kerja hari ini. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, Pak Menteri sebelum saya tutup, saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir dari Rapat Kerja hari ini.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Terima kasih.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Rapat yang sangat produktif, saya terima kasih sekali perhatian Bapak/Ibu sekalian yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi awal setelah sekian lama tertunda kita bisa mengantarkan jamaah umroh Indonesia kembali ke tanah suci dengan keadaan sehat wal'afiat dan aman.

Saya ingin menegaskan, bahwa komunikasi kami dengan Menteri Haji dan beberapa pihak di Arab Saudi mereka selalu menyatakan bahwa keamanan dan keselamatan manusia itu menjadi pertimbangan utama, siapa pun yang kita temui di sana, betul Pak Ketua ya selalu menyampaikan itu dan mudah-mudahan ikhtiar kita ini juga kita dasari atas itu keamanan dan kesehatan, serta keselamatan para jamaah. Dengan begitu mudah-mudahan pintu haji pun akan terbuka untuk jamaah Indonesia dan kita semua bisa kembali menjalankan ibadah dengan baik.

Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik, terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Demikianlah para Anggota Komisi dan Pimpinan, Rapat Kerja ini sudah di akhir semua

rangkaian acaranya. Kami sampaikan juga dari pertemuan dengan para pihak penting di Saudi itu, bahwa setiap pejabat menyampaikan Indonesia adalah sahabat baik Saudi, tidak ada persoalan apa pun kecuali tadi kata Pak Menteri masalah keselamatan jiwa manusia itu saja menjadi pertimbangan jadi tidak ada soal yang lain. Oleh karena itu harapan kita jamaah umroh di bulan Desember bisa berangkat Pak Menteri gitu ya dan haji di musim tahun 2022 bisa terlaksana, doa kita semua Insya Allah bisa diijabah oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *alamin* Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 13.20 WIB)

Jakarta, 30 November 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001